



**PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBERNATASAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum*

Disusun Oleh:

SUTJAHJO PADMO WASONO,SH
B4A 002 051

Kajian: SPP

Pembimbing :

Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBERNATASAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

TESIS

Disusun Oleh:

SUTJAHJO PADMO WASONO,SH
B4A 002 051

Dipertahankan di dewan penguji
Pada Tanggal :

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,

Pembimbing, Ketua,
Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya,SH.MH

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto,SH.MH
NIP. 130 351 702

ABSTRAK

Disadari atau tidak bahwa dalam dewasa ini, banyak terdapat tindakan yang membuat kita menjadi takut terhadap tindakan yang dilakukan oleh kaum radikal. Dalam kenyataannya, kita merasa terganggu akan aktivitas kita dalam menjalani kehidupan.

Aksi terorisme akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat kita menjadi semakin takut dalam melakukan segenap aktivitas. Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Bagaimanakah upaya penal dan non penal dalam penanganan tindak pidana terorisme ?
- 2) Bagaimanakah peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa tindak pidana terorisme ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data-data empiris yang didapatkan dari ketentuan perundang-undangan dan data lapangan.

Penanganan terhadap pelaku terorisme ini dengan dihadapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengeboman di berbagai tempat di Indonesia.

Disamping itu, dalam penelitian ini juga mencantumkan mengenai hak dan kewenangan pelaku atau teroris dalam mendapatkan haknya sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Terorisme, Teroris, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACTION

Realized or not that in these days, many there is actions making we to become fear to action done by the radical. In in reality, we feel annoyed our activity to in experiencing life.

Action of Terrorism recently often happened and makes we to become increasingly fear in doing whole activity. In this research writer studies some problemses that is :

- 1) How effort penal and non penal in handling of terrorism crime ?
- 2) How role of inviters Number 15 The year 2003 about Terorisme in protection of terrorism crime defendant ?

In this research, writer applies approach method of justicial normative by bases empiric data got from legislation rule and data is field.

Handling to this terrorism perpetrator with presenting of inviters Nomor 15 The year 2003 about in protection of the accused rights and terrorism is expected able to give effect to discourage to perpetrator pengeboman in various places in Indonesia.

Side that, in this research also mentions about rights and authority of perpetrator or terrorist in getting its(the rights as according to rights owned that is Human right.

Keyword : Terrorism Crime, Protection of Law and Human right

KATA PENGANTAR.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah,SWT, yang mana atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil judul :” PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERNATASAN TINDAK PIDANA TERORISME”

Di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, terutama dalam menggali, mengungkapkan dan menguraikan hal-hal yang penulis kemukakan serta sebagai bahan informasi kepustakaan, namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan maka penulis dapat menyelesaikannya.

Atas terselesainya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terhingga dengan penuh rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr. dr. Susilo Wibowo,MS., Med., Sp. And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto,SH.MH, Selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, Selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini
4. Seluruh anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Istri dan anak-anakku yang tercinta yang telah berkorban dan selalu berdo'a untuk keselamatan dan kesuksesan suami dan bapaknya tercinta.
7. Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan demi kesempurnaan tesis ini.
8. Teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum ketenagakerjaa. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang, September 2008

Hormat Penulis

SUTJAHJO PADMO WASONO,SH
B4A 002 051

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|----|
| Halaman judul | i |
| Halaman pengesahan pembimbing | ii |

| | |
|------------------------------|------|
| Pengesahan ujian tesis | iii |
| Pengesahan tim penguji | iv |
| Abstrak | v |
| Abstract | vi |
| Kata pengantar..... | vii |
| Daftar isi..... | viii |

BAB I Pendahuluan

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 4 |
| E. Kerangka Teoritik | 5 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Penulisan | 20 |

BAB II Tinjauan Pustaka

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Pengertian Terorisme | 22 |
| B. Batasan Terorisme | 24 |
| C. Metode Terorisme | 27 |
| D. Taktik Terorisme | 28 |
| E. Pengaruh Dan Dampak Terorisme..... | 30 |

BAB III Hasil dan Pembahasan

| | |
|--|----|
| A. 1. Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme | 32 |
|--|----|

| | |
|--|-----|
| A. 2. Catatan Terorisme Di Indonesia Sesudah Tahun 1965 | 43 |
| A. 3. Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan | |
| Terorisme Dalam Menimbulkan Efek Jera | 57 |
| B. Peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam | |
| perlindungan hak tersangka dan terdakwa tindak Pidana | |
| Terorisme | 83 |
| BAB IV Penutup | |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak tiga tahun terakhir ini, terorisme menjadi salah satu wacana yang akrab di telinga . Tragedi World Trade Center, Bom Bali, Bursa Efek Jakarta, JW. Marriot dan Bom di depan Kedutaan Besar Australia di Kuningan pada tanggal 9 September 2004 lalu mengguncangkan hati dengan kengerian yang luar biasa. Ribuan orang meninggal, trauma, luka dan cacat sumur hidup dalam waktu seketika.

Lantas bagaimana cara memerangi terorisme? Menyimak cara aparat negara menangani kasus Bom Bali dan bom JW. Marriot, ada kesan pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal formal dan represif dalam menangani masalah terorisme di Tanah Air. Indikasi semacam itu diperkuat dengan bersemangatnya pemerintah mengeluarkan berbagai Undang-Undang untuk mengatasi masalah terorisme akhir-akhir ini, termasuk usulan untuk mengeluarkan *Internal Security Act* yang diyakini banyak pihak pasti akan bersifat represif dan Rancangan Undang-Undang revisi anti terorisme. Padahal, pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 saja sudah menyulut berbagai pertentangan dan kritik seputar hak asasi manusia.

Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengundang kontroversi dan polemik diantara para ahli hukum mulai dari mengenai definisi sampai apakah terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula,

pemberlakuan asas retroaktif terhadap para pelaku bom bali dan pernyataan tidak sah Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pemberlakuan asas retroaktif tersebut.

Namun demikian, tidak pelak lagi masalah terorisme di Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional sehingga memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.

Dalam penanganan terhadap keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawie Arief antara lain :

- Rubin, menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- Schultz, menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat;
- Johannes Andenaes, menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita;
- Wolf Middelndorf, menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.
- Donald R. Taft dan Ralph W. England, pernah jug amenyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- R. Hood dan R. Spark, menyatakan bahwa beberapa aspek lain dari “*general prevention*” seperti “*reinforcing social value*”, “*strengthening the common*

sonscience”, “*alleviating fear*” dan “*providing a sense of communal security*” sulit untuk diteliti.¹

Untuk itulah dalam rangka mengetahui bagaimana upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam penanganan terhadap tindak pidana terorisme maka penulis membuat suatu penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam mewujudkan suatu penelitian terhadap penanganan tindak pidana terorisme ini menulis membuat rumusan masalah yaitu:

- 3) Bagaimanakah upaya penal dan non penal dalam penanganan tindak pidana terorisme dewasa ini?
- 4) Bagaimanakah peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa tindak pidana terorisme ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini yaitu mengetahui penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan

¹ Barda Nawawie Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 69-70

pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah :

- a. untuk mengetahui tindakan upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana terorisme;
- b. untuk mengetahui peranan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan mendasarkan pada rumusan permasalahan, maka dalam penelitian ini diharapkan tesis ini dapat memberikan kegunaan dalam hal :

1. Kegunaan Praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi himpunan peraturan di bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Teoritis

Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana serta memberikan gambaran kepada pemerintah dalam mengukur relevansi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga jika memungkinkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan terhadap revisi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terdahulu.

E. KERANGKA TEORITIS

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil dari pada perang.² Dari segi bahasa, istilah terorisme berasal dari bahasa Perancis pada abad ke-18. Kata terorisme yang berarti dalam keadaan teror (*under the terror*) berasal dari bahasa *Terrere* (gemetaran) dan *deterre* (takut).³

Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Istilah terorisme (*terrorism*) dan teroris (*terrorist*) sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasikan efek yang mana “terorisme” tadinya hanyalah istilah untuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang orang yang diserang. Polarisasi itu terbentuk karena adanya relativitas maka terorisme yang mana menurut William Purdeue (1989), *the used word “terrorism” is one method of delegitimation often use by side that has the military advantages*.”⁴

Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah terorisme meluas dari warga yang tidak puas sampai pada nonkonformis politik.

² <http://en.wikipedia.org/wiki/terrorism>. diakses tanggal 12 April 2005

³ Lihat *History and Causes of Terrorism*, <http://en.wikipedia.org/wiki/terrorism>. Diakses tanggal 12 April 2005

⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *State Terrorism*, Kompas Cyber Media, Jakarta, Edisi 10 April 2002.

Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka misalnya antara lain para militer, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh teroris yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan.

Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah *State Terrorism*, namun mayoritas masyarakat membedakan antara kekerasan yang dilakukan secara acak, tidak kenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua muda bahkan anak-anak, kaya, miskin, siapapun dapat diserang.

Dalam suatu rancangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ada pencantuman beberapa tindak pidana baru dimana beberapa pasal bukan Cuma dirumuskan terlalu luas, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dengan adanya kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada aktivitas-aktivitas untuk perbuatan sebelum terjadinya tindak pidana terorisme seperti pada Pasal 9A, yang berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun, setiap yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan sebagai bahan peledak.

2) Apabila bahan-bahan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme, pelaku pidana dapat dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Rancangan revisi Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan jenis bahan peledak yang dimaksud padahal produsen pupuk, nelayan kecil-kecilan dan pekerja tambangpun membutuhkan bahan-bahan yang jika dicampur dengan bahan tertentu dapat menjadi bahan peledak. Bahkan bensin, kain dan botol kosongpun dapat menjadi bahan peledak. Jika ketentuan pasal ini disahkan maka bagaimana dengan nasib produsen pupuk, nelayan dan pekerja tambang. Untuk itu sedianya akan diperlukan peraturan distribusi bahan-bahan kimia serta bahan pengawas distribusi bahan kimia. Hal yang tentunya membutuhkan biaya serta diragukan untuk terealisasi dengan baik.

Selain itu bagaimana seorang pedagang bahan kimia akan menjual barang-barangnya dengan itikad baik dapat mengetahui bahwa pembelinya merupakan sidikat suatu terorisme atau tidak ? Banyak cara yang dapat digunakan para teroris untuk mendapatkan bahan peledak tidak hanya dengan membeli dari para pedagang bahan kimia secara langsung.

Pada Pasal 26 Rancangan Revisi Undang-Undang dinyatakan bahwa laporan intelejen dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Laporan intelejen tersebut pada ayat (1a) menyatakan bahwa jika berasal dari instansi lain selain dari Kepolisian Republik Indonesia wajib dilakukan autentifikasi oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk. Namun tidak disebutkan siapakan pejabat yang ditunjuk itu. Selain itu, diakui oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan

Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Sudrajat bahwa pasal ini digunakan untuk menambah kewenangan intelejen untuk memburu dan menangkap aksi terorisme. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 laporan intelejen hanya sebagai bukti permulaan yang merupakan barang bukti pendukung (*supporting evidence*).

Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan mendasar antara pengertian *intelligence evidence* dengan *crime evidence*. *Crime evidence* dapat mencakup *intelligence evidence*, namun *intelligence evidence* tidak memerlukan suatu fakta hukum yang mengatur untuk merumuskan perbuatan-perbuatan sebagai indikasi atau dasar adanya tindak pidana. Hal ini dikarenakan *intelligence evidence* merupakan abstraksi data yang seringkali tidak membutuhkan pembuktian. Misalnya korban tewas karena bom mobil atau keterlibatan Noordin M. Top dan Dr. Azahari dalam peledakan bom kuningan adalah *intelligence evidence*. Sedangkan *crime evidence* membutuhkan fakta hukum yang konkrit sebagai ciri *Rule of Law*. Disini Noordin M. Top dan Dr. Azahari harus didengar kesaksiannya di Pengadilan. Dengan menggunakan laporan intelejen sebagai alat bukti jelas mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan tidak dapat diabaikan kemungkinan dilakukannya inkriminasi terhadap para tersangka teroris.

Pasal 31 RUU juga memasukkan hak-hak penyidik untuk membuka dan memeriksa serta menyita surat dari kiriman melalui pos serta melakukan penyadapan pembicaraan. Pasal ini bahkan tidak memberikan batasan terhadap tindakan penyadapan apa saja yang boleh dilakukan penyidik. Penyidik hanya cukup memiliki bukti permulaan yang cukup untuk bisa melakukan itu semua.

Pasal 34 RUU dicantumkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan jarak jauh terhadap tatap muka dengan tersangka dengan menggunakan layar monitor. Artinya, dalam RUU ini mengijinkanmenggunakan telekonferensi sebagai alternatif dalam kehadiran saksi dimuka sidang. Naum lagi-lagi RUU ini tidak menjelaskan apa syarat seseorang tersebut tidak perlu dihadirkan dimuka sidang dan tidak menjelaskan prasyarat untuk membuat suatu telekonferensi yang memerlukan beberapa prasyarat teknis terlebih dahulu seperti sertifikasi sistem komunikasi dan keamanan ruangan saksi yang diperiksa melalui telekonferensi.

Terorisme berkaitan erat antara delik politik dan delik kekerasan sehingga pandangan mengenai terorisme sering kali bersifat subjektif.⁵ Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebelumnya ada pasal yang sangat riskan melanggar Hak Asasi Manusia (Pasal 46) yaitu asas retroaktif. Kemudian pada bulan Juli 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak mempunyai hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan bahwa asas retroaktif adalah asas hukum yang bersifat universal yang hanya dapat diberlakukan terhadap jenis kejahatan seperti genodida (*crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*crimes of aggression*) dengan merujuk pada statua Roma Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Kompas Cyber Media, "Revisi UU Terorisme: Diakui untuk tambah kewenangan intelejen", Sabtu, 30 Agustus 2003

Menurut Mahkamah Konstitusi, terorisme hanyalah kejahatan biasa yang sangat kejam maka dalam kejahatan terorisme untuk bom Bali tidak dapat diberlakukan asas retroaktif. Ini artinya, karena terorisme bukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidak dapat diberlakukan asas retroaktif. Hal itu, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu tentu saja mengandung kontroversi para praktisi hukum seperti Amir Syamhudi⁶ dan Frans Hendra Winata⁷. Mereka berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan hak asasi bagi pelaku terorisme, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan akibat terorisme itu sendiri, termasuk korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

Sebenarnya telah terjadi perdebatan alot mengenai definisi kejahatan terorisme di lingkungan internasional. Perbedaan tersebut seputar apakah dapat dimasukkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) saja, tetapi bukan sebagai kejahatan kemanusiaan. Dan ternyata, ada desakan yang sangat kuat untuk memasukkan kejahatan *treaty-based crimes related to terrorism and drugs trafficking* (teroris dan narkoba) sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga banyak sekali ahli hukum yang mendukung *Internasional Criminal Court (ICC)* untuk memasukkan kejahatan tersebut dalam yuridiksinya.

Menurut mereka, ICC adalah lembaga prospektif yang seharusnya tidak hanya menerapkan yuridiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang telah

⁶ Indrianto Seno Adji, , "Terorisme" Perpu No.1 tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dalam Nuku OC. Kaligis & Associates, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta, 2003, hal. 45

⁷ Ibid, hal.35

ditentukan oleh Statua Roma Tahun 1998. Dalam hal ini, asas legalitas tetap dipandang sebagai asas fundamental. Namun berkaitan dengan yuridiksi ICC, asas ini dapat disimpangi bila negara yang bersangkutan telah mencabut suatu pernyataan bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan yuridiksi oleh pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan tertentu dimasa lalu. Bertitik tolak dari pembahasan mengenai yuridiksi ICC di atas, maka sewajarnya bahwa kejahatan terorisme masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan karena korbannya masal yang menghancurkan kemanusiaan dan peradaban.

Dilain pihak penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini memiliki sisi negatif. Kebijakan yang terlalu bertumpu pada pendekatan legal formal dan bersifat represif perlu ditinjau ulang karena bukan saja tidak akan mampu mengatasi masalah terorisme tetapi justru dapat meningkatkan tindakan kekerasan semacam itu dimasa yang akan datang. Hal ini terbukti dengan adanya peristiwa pengeboman di depan kantor Kedubes di Kuningan pada bulan september 2004 lalu yang berkekuatan ledak lebih tinggi daripada pengeboman Marriot. Pemerintah perlu juga memikirkan alternatif pendekatan dalam menyelesaikan masalah terorisme di Tanah Air diluar pendekatan legal formal dan represif.

Ada beberapa hal yang menyebabkan cara penyelesaian yang berbasis legal formal dan represif ini kurang mampu menyelesaikan masalah terorisme:⁸

- 1) Logika dibelakang pendekatan melalui mekanisme hukum ini berlawanan dengan logika yang dianut para teroris sendiri. Sanksi pidana dibuat pada dasarnya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindakan tersebut

⁸ Amir Syamsudin, *Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Kompas Cyber Media

dan atau menghukum mereka yang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang dengan harapan pelaku maupun orang lain tidak melakukan hal-hal yang sama kelak dengan cara menerapkan sanksi fisik bagi pelanggar, mulai dari yang teringan sampai yang terberat seperti hukuman mati. Tetapi logika semacam ini berlawanan dengan logika kaum teroris yang bertindak jauh melampaui rasa takut terhadap ancaman hukuman tersebut.

- 2) Cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif seperti ini dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan tujuan semula untuk memerangi terorisme. Tindakan semacam ini tidak mustahil justru dapat memicu oerlawanan dan radikalisme baru yang lebih hebat, bukan dari kelompok masyarakat yang dituding terlibat aksi terorisme, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari kelompok-kelompok lainnya. Apalagi tiap penerapan cara penanganan semacam ini seringkali bukannya “mengobati” dan “menyembuhkan luka” dan rasa frustrasi suatu kelompok dalam masyarakat, tetapi justru cenderung berakibat semakin “mendiskreditkan” dan “memojokkan” mereka. Dengan kata lain, cara semacam ini dapat berdampak meluasnya pihak-pihak antipemerintah atau anti kelompoklain.
- 3) Penerapan undang-undang yang represif seperti undang-undang anti teroris dan *Internal Security Act* (ISA) dapat membawa implikasi dan berdampak negatif bagi kehidupan bernegara, wewenang aparat negara jadi amat besar sehingga terbuka peluang disalahgunakan. Ada kemungkinan tiap orang yang dicurigai sebagai teroris dapat diperiksa dan ditangkap tanpa prosedur hukum yang sah dan benar. Tiap lawan politik yang berseberangan misalnya dapat

dikenakan pasal-pasal undang-undang ini. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya *State Terrorism* yang tentunya akan membawa masalah penjang yang tidak berkesudahan.

- 4) Keberhasilan membuat perangkat hukum yang baik belum tentu membawa dampak positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum. Sebagai apapun produk hukum formal tidak akan ada artinya tanpa disertai penerapan yang baik. Ironisnya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pandai membuat produk hukum yang baik namun lemah dalam penerapannya. Hal semacam inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dalam jangka panjang memerangi terorisme tidak cukup dan tidak akan pernah berhasil hanya dengan menindak pelaku teror dan peledakan bom dengan kekerasan. Lihatlah apa yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap Afganistan dan Iraq, Israel terhadap Palestina. Aksi militer seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Australia terhadap Iraq dan Afganistan mungkin bisa berlangsung lama karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Menindak para pelaku teror dengan kekerasan memang tidak dapat untuk memerangi terorisme secara tuntas, para pelaku teror justru merasa dirinya sebagai pahlawan. Ketika aksi terorisme mulai meningkat dan alasan mengapa aksi tersebut dilakukan sudah bantu, kebijakan yang ada harus dipelajari kembali. Fakta telah menunjukkan bahwa membunuh pelaku, mengisolasi dan

memenjarakan pemimpin organisasi teroris menghentikan tindak teroris namun hal itu tidak berlangsung lama.⁹

Sementara itu, Indonesia harus diakui, munculnya tindak terorisme menandakan ada suatu yang salah dalam sistem sosial, politik dan ekonomi. Para pelaku teroris semakin menjadi radikal dan umumnya karena merasa terasing dan termarginalisasi dari kehidupan sosial, politik, dan atau ekonomi masyarakatnya. Keterasingan tersebut pada umumnya bersifat struktural yang termanifestasikan pada kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif atau merugikan dalam waktu panjang. Hal ini mengakibatkan adanya perasaan tidak puas, benci pada pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu, seperti orang kaya, penguasa dan orang asing yang dianggap telah melangkahi kepentingan mereka. Namun, upaya mereka untuk lepas dari keterasingan tersebut secara normal mengalami hambatan karena tidak adanya ruang baginya untuk berpartisipasi atau mengeluarkan harapan dan kepentingan mereka sehingga timbullah suatu aksi radikal seperti terorisme.

Amatlah penting untuk menerapkan cara-cara lain yang lebih persuasif dan akomodatif terhadap kepentingan berbagai kelompok yang dianggap berpotensi melakukan tindakan terorisme. Misalnya dengan menerapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kepentingan berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama ini. Termasuk kemungkinan penerapan kebijakan yang bersifat dan mengandung unsur konsensi dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat dan unsur-unsurnya dalam masyarakat itu sendiri.

⁹ Frans Hendra Winata, *Loc Cit*,

F. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹⁰

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.¹¹ Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan¹².

E.1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Artinya menelusuri penelitian antara cara dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 1

¹¹ Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 19

Lihat juga pendapat Bambang Sunggono, dalam *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hal 27. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari) dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali

¹² Murseh Mursanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, Haji Masagung, Jakarta 1981 hal 31

prosedur penanganan terhadap tindak pidana terorisme dan upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam penanganan terhadap pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia yang senantiasa mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh penanganan pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

E.2. Sumber Data.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹³

1. Data Primer.

Data primer merupakan suatu data yang dalam pengumpulan datanya didapatkan langsung dari lapangan. Data primer ini bersifat *original*.

2. Data sekunder.

Adapun data sekunder yang diperlukan adalah data diperoleh dari study kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan,

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 12

buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup ¹⁴:

- kegiatan yang dilakukan oleh para terpidana kasus terorisme;
- Kronologi jaringan terorisme di Indonesia
- Dan data lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Kemudian di dalam penelitian juga diperlukan Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder yang meliputi “

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Undang-Undang 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bol di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004
- serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian diatas.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji ibid hal 13

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

E.5 Teknik Analisa Data.

Semua data yang terkumpul secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif. Analisis normatif ini merupakan suatu metode analisa data yang digunakan sebagai upaya untuk menganalisa suatu kejadian atau masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Teknik analisa data inilah yang digunakan sebagai penunjang dalam rangka untuk menemukan suatu akar permasalahan yang digunakan dalam suatu penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penulisan tesis ini, penulis merumuskan menjadi 4 (empat) bab yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi tentang Pendahuluan yang terperinci dalam latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini menguraikan mengenai pengertian teroris, metode teroris, taktik teroris, dampak dan pengaruh teroris dan catatan teroris.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menyajikan mengenai masalah yang melatar belakangi penulisan tesis ini yang meliputi tentang :

- 1) Bagaimanakah upaya penal dan non penal dalam penanganan tindak pidana terorisme ?
- 2) Bagaimanakah peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa tindak pidana terorisme ?

Bab IV PENUTUP

Dalam bab IV Penutup ini, dibagi menjadi 2 sub bab yaitu sub bab A Kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dalam penulisan tesis ini dan sub bab B Saran yang berisi tentang sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TERORISME

Kata "teror"¹⁵ masuk kedalam kosa kata politis pada revolusi Prancis, diakhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang Perang Dunia ke II, Terorisme menjadi menjadi tehnik perjuangan revolusi. Misalnya dalam rezim Stalin pada 1930-an disebut pemerintahan terror. Di era perang dingin dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.

Terorisme merupakan fenomena yang lazim dalam masyarakat demokratis, liberal, dan sebuah pemerintahan yang mengalami transisi. Teroris memanfaatkan kebebasan di masyarakat, di Negara totaliter atau otoriter situasi keamanan lebih terkendali. Kalau toh ada teror, bisa jadi hanya terror oleh Negara. Sejauh rakyat petuh terhadap rezim berkuasa keamanan mereka terjaga. Bandingkan keamanan pada waktu di bawah kontrol Presiden Saddam Husein atau era komunis uni soviet dengan kondisi sekarang yang marak ledakan Bom.

Terorisme pada 1970-an beragam fenomena dari bom yang meledak ditempat - tempat publik dengan kemiskinan dan kelaparan. Biasanya pemerintah diktaktor menstigma musuh-musuhnya sebagai teroris dan aksi-aksi mereka disebut terorisme. Istilah terorisme jelas berkonotasi peyoratif layaknya genosida sehingga rentan

¹⁵ Lapoaran DKPT, dimuat dalam www.zntitor.com

dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan, mengingat tidak lepas dari kepentingan politis.

Dalam sejarah kehidupan manusia terror adalah fenomena klasik. Menakutkan, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan terror atau terorisme. Menurut Muladi (2002), tindak pidana terorisme dapat dikategorikan "mala per se" atau "mala prohibita", "mala per se" adalah kejahatan atas nurani (crime against conscience) menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang tetapi memang tercela (natural wrong atau acts wrong in them selves).

Siapa pun pelakunya dan apa pun motif dibalik tindakan terror, tidak bisa ditolerir, tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (extradonary crime) aksi teror pada ruang public dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya⁴ disamping menimbulkan ketakutan, peristiwa terror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentiment masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut.

Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai Negara.

B. BATASAN TERORISME

Terorisme masuk kedalam kekerasan politis (political violence)¹⁶ seperti kerusuhan, huru-hara pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, dan pembantaian, namun teroris misalnya penyanderaan yang dilakukan psikopat, sadistik ataupun orang iseng. Ini diluar pembahasan kita.

Hard Core kelompok teroris adalah fanatik yang siap mati. Teroris tampaknya adalah seorang pribadi narsistik, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatic, dan seterusnya. tipe personalitas pra teroris ini cocok dengan gerakan totaliter, sistem tertutup dan sekte. Adakah ciri-ciri seperti ada disekitar kita? Kalau ada waspadalah karena orang tersebut gampang direkrut menjadi teroris.

Jika dicermati, terror itu sendiri sesungguhnya merupakan pengalaman subyektif sebab setiap orang memiliki ambang batas ketakutan. Ada orang bisa bertahan meski lama dianiaya, namun ada orang cepat panik. Didalam dimensi subyektif inilah terdapat peluang kewenangan stigmatisasi atas pelaku terorisme.

Justifikasi aksi terorisme oleh para pelaku biasanya didasarkan¹⁷

- Segala cara dibenarkan demi pencapaian tujuan transendental
- Kekerasan extreme dianggap bersifat katarsis, memberi rahmat, regenerative
- Pelaku meletakkan aksinya dalam konteks sejarah, dimana aksi itu merupakan elemen dari Hukum Sejarah itu sendiri
- Dijelaskan dari perspektif moral kesetimpalan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, begitu seterusnya, sebagaimana kita saksikan dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina.

¹⁶ Loudewijk F Paulus, Kolonel INF, TNI (kopasus) *Terorisme*, Dimuat dalam website LITBANG DEPHAN

¹⁷ [www. Antiteror.com](http://www.Antiteror.com)

Pengertian terorisme bermacam versinya, menurut Konvensi PBB Tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukkan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Menurut *U.S. Departement of defense* tahun 1990, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan ideologi.

Pasca bom WTC, New York dan Pentagon di AS, 11 September 2001, arti teroris menjadi “penting” walaupun belum ada definisi “teroris” namun bagi “intelijen” sudah punya arti baku “teroris” yakni kelompok kecil (*small group*) yang menyerang kekuasaan untuk kepentingannya.

Definisi lainnya teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut untuk tujuan politiknya. Perpu No. 1 Tahun 2002, yang dimaksud tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap seseorang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat misal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau internasional. Teroris dalam pengertian diatas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, oknum militer, maupun oknum polisi yang bertanggungjawab secara individual atau kelompok.

Karakteristik teroris antara lain :

- Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi dan bermilitan
- Merupakan kelompok kecil yang yang diindoktrinasi dan dilatih bertahun-tahun
- Untuk mencapai tujuan politik, melakukan perbuatan kriminal
- Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti mengabaikan agama, hukum norma lainnya
- Dalam aksinya memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi dengan menebar rasa takut lewat publikasi luas

Karakteristik Terorisme dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat macam yaitu:

- o Karakteristik Organisasi, meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional
- o Karakteristik Operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan solusi.
- o Karakteristik Perilaku, meliputi : motivasi, dedikasi, disiplin keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup.
- o Karakteristik Sumber Daya, meliputi : latihan atau kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi

C. METODE TERORIS

Operasi teroris dilaksanakan oleh elemen clandestine (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum pelaksanaan menghancurkan target. Pengintaian dilakukan personal sebagai intel khusus.

Berbagai simulasi serangan diperagakan untuk memastikan Keberhasilan pelaksanaan sebuah operasi teror, walau titik tertentu yang diputuskan menjadi target. Sebelum ditentukan target, biasanya teroris mencari dan mengeksploitasi titik lemah sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengamanannya.

Teroris beroperasi dalam unit kecil. Terdiri dari personel terlatih menggunakan senapan otomatis ringan, granat tangan, bahan peledak amunisi, radio transistor serta peralatan pendukung. Sebelum pelaksanaan operasi kelompok teroris berbaur dengan masyarakat, sehingga sulit dideteksi aparat kepolisian.

Di Indonesia misalnya peracikan bom umumnya dilakukan di rumah kontrakan sederhana atau kas-kosan. Sebelum menjalankan aksinya mengontrak rumah sederhana di pemukiman padat penduduk berusaha melakukan kamuflase sehingga aktivitas mereka tidak kentara.

D. TAKTIK TERORIS

1. Bom

Aksi kekerasan peledakan bom ditempat-tempat strategis dan vital sering dipilih kelompok teroris. Dalam dekade terakhir tercatat 67 % aksi teror berhubungan dengan peledakan bom.

2. Pembajakan

Pembajakan umumnya dilancarkan kelompok teroris selama periode 1960-1970. Pembajakan kendaraan yang membawa bahan makanan misalnya, dipilih kelompok Tupamaros di Uruguay sebagai taktik ala Robinhood melawan pemerintah. Perkembangan saat ini, target teroris adalah membajak pesawat terbang komersil.

3. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan tsrtua dimuka bumi. Sasaran pembunuhan sudah ditetapkan sebelumnya biasanya pejabat pemerintah, pengusaha,politisi, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Usai beraksi teroris mengklaim bertanggungja wab. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 246 kasus pembunuhan berbagai tokoh oleh teroris di seluruh dunia.

4. Penghadangan

Salah satu cara kelompok teroris menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghadangan. Operasi ini diawali survai dan perencanaan. Lalu menetapkan waktu. Umumnya dipilih medan yang memberi kemudahan untuk beraksi melumpuhkan targetnya.

5. Penculikan

Penculikan terhadap target dilakukan untuk tujuan tertentu. Kasus kelompok separatis Abu Sayaf di Filipina, misalnya penculikan disertai tuntutan tebusan uang, serta tuntutan politik.

6. Penyanderaan

Aksi penyanderaan manusia di tempat umum sering dilakukan teroris berhadapan langsung dengan aperat keamanan. Kelompok teroris meminta sejumlah tuntutan sebagai tebusan seperti uang dan lainnya. Memang ada kasus tuntutan dipenuhi, namun negara yang bersikap keras, akan berusaha melumpuhkan kelompok teroris dengan pasukan khusus antiteror.

7. Perampokan

Untuk membiayai operasionalnya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Aksi ini biasanya mengikut sertakan personel baru

sebagai uji coba sebelum dilibatkan dalam aksi yang lebih besar. Persidangan "Kelompok Serang", di pengadilan terungkap bahwa perampokan toko mas di Serang dimaksudkan untuk mendukung biaya operasional peledakan bom di Indonesia.

8. Ancaman/Intimidasi

Menakut-nakuti dan mengancam seseorang atau kelompok tertentu umumnya dilakukan di daerah rawan dan sarat konflik sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak teroris. Contohnya intimidasi kelompok GAM terhadap warga sipil, dan sejumlah perusahaan di NAD yang minta "pajak".

E. PENGARUH DAN DAMPAK TERORISME

Aksi terorisme selain berpengaruh luar biasa pada ketakutan publik dalam sistem kenegaraan, aksi terorisme juga berdampak jauh pada hampir semua bidang kehidupan seperti ideologi, ekonomi, politik pertahanan keamanan bahkan agama.

1. Ideologi

Persepsi yang berhasil dibangun di tengah-tengah masyarakat internasional, Osama bin Laden merupakan musuh nomor satu Amerika. Osama bin Laden beserta organisasi Al Qaeda dianggap sebagai kelompok anti kapitalisme. Sementara bagi kalangan tertentu, Osama dan organisasinya merupakan pahlawan yang melawan arogansi AS dan sekutunya sebagai simbol kapitalisme. Perang yang sedang berlangsung saat ini adalah antara fanatis dan radikalisme agama Islam versus neokolonialisme dan kapitalisme.

2. Agama

Tujuan semua agama pada dasarnya menjadi rahmat, membawa pesan perdamaian umat manusia di dunia. Yang jadi masalah adalah kalau agama diideologikan dan ideologi diagamakan sekelompok orang. Bila agama dijadikan kendaraan politik untuk merebut kekuasaan sesaat, sangat rentan menyerat umat ke area konflik berkepanjangan.

3. Politik

Pasca pemboman WTC di New York, 11 September 2001 peta politik dunia berubah drastis. AS mengakomodir kebijakan luar negeri "pre-emptif" dan menggalang kerjasama berbagai negara untuk memberantas terorisme. Jaringan Osama bin Laden bersama organisasi Al Qaeda-nya dijadikan musuh oleh AS dan sekutunya.

4. Ekonomi

Dampak tragedi pengeboman WTC membuat "trauma berpergian" masyarakat dunia dengan pesawat terbang. Dampaknya dirasakan berbagai perusahaan penerbangan diberbagai negara menyebabkan maskapai penerbangan mengalami kerugian.

5. Pertahanan dan Keamanan

Perang terhadap terorisme yang diprakarsai Amerika melampaui batas wilayah domestik negara. Kedepan, terorisme tidak mengenal batas wilayah, baik aksi maupun dampak yang ditimbulkannya. Contohnya penyerangan Amerika Serikat ke Afganistan dan Irak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 1. Upaya Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Gema ledakan bom di Bali 12 September 2002 berdampak internasional. Jumlah korban yang tewas merupakan terbesar dalam sejarah peledakan bom di Indonesia. Ledakan terjadi di tiga lokasi yang hampir bersamaan itu Renon (dekat konsulat AS), Peddy's cafe dan Sari Club merengut nyawa banyak warga negara asing, sebagian besar warga Negara Australia. Logis kalau ketiga ledakan itu merupakan aksi yang sama, baik oleh pelaku, bahan yang digunakan, maupun dalang atau orang yang mengarsiteki kejadian itu.

Aparat kepolisian Indonesia, bekerja sama dengan aparat keamanan luar negeri, berhasil mengidentifikasi dan menangkap sejumlah pelaku. Mereka antara lain Amrozi, Imam Samudra Mukhlas, Ali Imron. Namun masih menyisakan pertanyaan, apakah aksi yang mengguncangkan Indonesia dan dunia itu betul-betul dilakukan oleh sekelompok anak muda di atas atau adapihak lain yang lebih kuat posisi maupun jaringan yang ikut bermain.

Melihat pola metode dan sasaran target, peledakan bom di Bali dilakukan oleh kelompok professional. Tidak heran bila muncul spekulasi bahwa mereka yang ditangkap hanyalah kaki tangan, atau orang-orang suruhan. Ada dugaan masih ada dalang dibalik pengeboman Bali. Yang menjadi pertanyaan adalah : siapa saja mereka bagaimana jaringan, dan apa motivasinya.

Hasil pemeriksaan aparat tersangka disimpulkan para pelaku bom Bali merupakan anggota sebuah jaringan organisasi berbasis luas, yaitu Jamaah Islamiyah(JI). Kelompok ini dituding menggunakan teror untuk mencapai cita-cita membangun " Islamiah di Asia Tenggara. Diketahui pula para anggotanya sebelumnya telah digembleng berbagai latihan ala militer, militan dan professional dalam melakukan teror. Meski masih tetap menyisakan pertanyaan tentang siapa otak dibelakang para pelaku, dengan tertangkapnya para pelaku lapangan, bom Bali menjadi "Kotak Pandora" yang mampu mengungkap semua aksi bom yang selama ini tidak diketahui atau tidak terbukti.

Informasi awal dilansir media internasional yang melaporkan bahwa Jamaah Islamiyah didukung oleh Al Qaeda sebuah jaringan pimpinan Osama bin Laden, orang yang dituduh Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggungjawab atas serangan bom di WTC dan Pentagon Amerika Serikat. Jaringan TV CNN mengutip sumber intelijen mengatakan bom Bali diorganisasi oleh Rabitatul Mujahidin Elemen ini merupakan sayap militer dari Jamaah Islamiyah yang memiliki kedekatan dengan Al Qaeda. Masih menurut CNN, bom Bali diarsiteki oleh Syafullah, orang yaman dan tokoh senior Al Qaeda. Dia diidentifikasi telah beberapa kali terlibat dalam serangan terhadap sasaran AS di Yaman dan Saudi

Arabia. Sumber intelijen itu mengatakan, Syafullah datang ke Indonesia dua hari sebelum aksi bom di Bali dengan paspor palsu sebagai warga Negara AS. Ia bertemu dengan sel Al Qaeda di Indonesia, yang diwakili oleh Imam Samudra dan Mukhlas di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu mereka mematangkan rencana aksi pengeboman Kuta. Informasi intelijen ini diperkuat oleh Rohan Gunaratna penulis buku Inside Al Qaeda.

Dikatakan, Rabitatul Mujahidin, merupakan sayap militer Jemaah Islamiyah. Dibentuk atas permintaan Al Qaeda untuk memfasilitasi interaksi kelompok Mujahidin di Asia Tenggara dengan sesama rekan seperjuangan mereka di Asia Selatan dan Timur Tengah. Dalam laporan itu juga memuat pernyataan Andrea Domingo, seorang pejabat tinggi imigrasi Filipina yang mengungkapkan Al Qaeda memasok dana untuk kegiatan Rabitatul Mujahidin. Organisasi itu dibentuk tahun 1999.

Dugaan dan sinyalemen keterkaitan antara jaringan sel terorisme di Tanah air dengan Jemaah Islamiyah dan Al Qaeda sudah diintrodusir beberapa saat sebelum terjadi bom Bali. Tidak lama setelah serangan bom di WTC, muncul dugaan personil Al Qaeda yang terusir oleh serangan A S ke Afganistan menyusup masuk ke Indonesia via Pakistan. Aktivis kelompok ini diduga telah melatih orang-orang tertentu di Poso, Sulawesi Tengah. Laporan lainnya datang dari informasi media massa di Spanyol. Diberitakan seorang tersangka Al Qaeda yang tertangkap di Spanyol Imad Eddin Barakat Yabbas, mengaku mempunyai hubungan dengan Parlindungan siregar, seorang warga Negara Indonesia. Orang ini, walau tidak diketahui siapa sebenarnya dan dimana keberadaannya?

Menurut sumber intelijen merupakan tokoh yang merekrut Mujahidin Spanyol untuk dikirim ke tempat latihan teroris di Afganistan, Bosnia dan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia santer dituding sebagai sarang berlindungnya teroris internasional. Tudingan ini memperoleh pembenaran setelah beberapa peristiwa penting antara lain tertangkapnya paru pelaku bom di Bali, pengakuan anggota JI yang ditangkap pihak keamanan Malaysia dan Singapura serta penangkapan Fathur Rohman Al Khozi dan Agus Dwikarna di Filipina.

Informasi yang memperkuat dugaan antara kelompok teroris Indonesia dan jaringan teroris internasional antara lain ditulis oleh Majalah Time awal tahun 2002. Mengutip sumber intelijen, majalah itu memberitakan, berbagai aksi terorisme di Asia Tenggara dikoordinasi oleh Hambali atau Ridwan Ishamuddin, 36 tahun asal Cianjur, Jawa Barat. Dia disebut-sebut sebagai pimpinan dan panglima Al Qaeda di Asia Tenggara, Ia diduga punya hubungan dekat dengan Mohammad Atef, petinggi Al Qaeda yang meninggal akibat serangan bom AS di Afganistan, November 2001.

Hambali disebut sudah beraksi sejak pertengahan 1990-an. Dia dituding terlibat dalam serangan bom ke pesawat Filipina Airlines. Ia juga berencana meledakkan 12 pesawat AS serta merencanakan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Manila. Majalah Time juga melaporkan pengakuan Umar Al Faruq, tokoh Al Qaeda yang ditangkap aparat keamanan Indonesia dan kemudian diserahkan ke intelijen AS (CIA) Juni 2002. Dalam interogasi mengaku terlibat dalam sejumlah peledakan bom di Indonesia seperti bom Natal, dan rencana membunuh Presiden Megawati.

Bom di Bali lalu menjadi semacam “kotak pandora” yang ketika dibuka, terkuak semua hal yang selama ini tertutup. Salah satu lembaga yang concern mengamati jaringan teror di tanah air adalah International Crisis Group (ICG). Dalam laporannya menguraikan rentetan peledakan bom di tanah air terkait sebuah jaringan terorisme internasional, Jamaah Islamiyah (JI). Laporan ICG menyebutkan, peristiwa malam Natal 2000 hingga tragedi bom Bali, kian menampakkan diri sebagai karya JI, suatu organisasi yang didirikan di Malaysia pertengahan tahun 1990-an oleh warga Indonesia. Menurut saya rentetan peristiwa bom malam Natal 2000 harus ditelusuri hingga ke akar permasalahannya, dibuka jaringan selnya diberbagai kota di Indonesia, mengingat organisasinya disiplin, militan dan terkoordinasi. Apa sebab? Fakta lapangan berikut perlu dicermati:

- o Bom malam Natal 2000 direncanakan rapi dan punya hubungan peledakan bom satu dengan bom lain. Kelompok ini mampu meledakkan sasaran di 11 kota yang berbeda pulau dan provinsi di Indonesia dalam waktu relatif bersamaan. Akibat rentetan peristiwa itu 11 orang tewas, dan 120 orang luka-luka. Dengan kemampuan kelompok dan individunya, organisasi yang meledakkan bom malam Natal tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau dibiarkan, aksinya bisa menjadi-jadi, sulit dikendalikan dan dipastikan menjadi bom waktu bagi perjalanan bangsa ke depan. Soalnya, tidak ada jaminan kekompakan kelompok ini bisa terus langgeng. Dengan menangkap para pentolannya, organisasinya bakal mandek dan mati. Dalam perjalanan mereka bisa saja pecah dan berseberangan satu sama lain

karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Buntutnya, muncul sempalan yang terus melakukan aksi-aksinya, sebagaimana kita saksikan di Filipina Selatan.

Informasi intelijen yang merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan para pelaku bom Bali mengungkap keberadaan Jemaah Is;amiyyah di Indonesia. Beredar informasi yang kemudian diakui oleh para pelaku sendiri bahwa JI bukan sekadar dugaan, tapi terbukti ada. JI dinilai menjadi biang teror bom di Indonesia serta di kawasan Asia Tenggara. Salah satu temuan mengungkap keberadaan JI disita aparat keamanan dari kediaman salah seorang tersangka. Dokumen itu berisi Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI dan Majelis Qiyadah Markaziyah al-Jamaah al-Ishmiyah (Majelis Pimpinan Pusa,JI). PUPJI berisi beberapa prinsip dasar yaitu: Prinsip dasar gerakan penegakan agama (Jshulul manhaj al-harakiy li iqamatud-dien), prinsipprinsip perjuangan, pedoman operasi (al-manhaj al-amaly), aturan dasar organisasi(i nidhom asasi). Kaderisasi dan pembinaan organisasi. Kalau dugaan kuatnya jaringan JI di Indonesia itu terbukti, apa implikasi dan temuan informasi ini? Menurut saya intelijen perlu memetakan permasalahan dan mengurai jaringan sel teroris di Indonesia, sehingga menjadi jelas pokok masalahnya. Hanya lewat penguasaan data akurat, bukan bisa, memaksa kita menjadi tahu apa masalah atau persoalan yang sesungguhnya kemudian menyelesaikan persoalan tersebut secara komprehensif.

Dugaan Indonesia sebagai sarang terorisme internasional sebenarnya mulai terkuak dengan ditangkapnya pentolan teroris di Bogor. Intelijen Indonesia bekerjasama dengan intelijen asing berhasil menangkap orang yang diduga kuat menjadi pemimpin Al Qaeda di Asia Tenggara. Sebelumnya Menteri Senior

Singapura Lee Kuan Yew membuat pernyataan, bahwa Indonesia menjadi pelarian para pentolan teroris yang dikejar oleh aparat keamanan di Malaysia dan Singapura. Namun Indonesia, yang saat itu menghadapi proses politik pelik pasca Orde Baru dengan menonjolnya gerakan kelompok tertentu, petinggi di Republik ini menampik tudingan sebaga "sarang terorisme"

Menjelang setahun bom WTC, pemerintah AS mengeluarkan dokumen penting, daftar teroris yang dianggap menjadi musuh dunia. Namun yang lebih penting bagi Indonesia, adalah perintah penting dari Gedung Putih. Isinya top secret. Namun dampaknya terasa dengan adanya peristiwa : Kedubes AS di Jakarta tutup selama tiga hari. Konsulat AS di Surabaya juga diliburkan. Saat itu disebut situasinya "status range" atau waspada penuh. Dubes AS saat itu, Ralph L Boyce meminta penjagaan keamanan diperketat di Kedubes AS di Jakarta.

Situasi genting itu dipicu oleh pengakuan penting Umar Al Faruq yang punya nama lain Mahmud bin Assegaf. Orang yang diduga sebagai tokoh dan motor jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara juga dikenal sebagai Al Faruq Al-Kuwaity. Dia ditangkap di Cijerug Bogor. Setelah tiga bulan diinterogasi, diselingi tekanan psikologis dan larangan tidur, diberitakan Faruq mengaku ia diperintah atasannya melakukan serangan ke berbagai kawasan penting milik AS di Indonesia dan sejumlah kawasan di Asia Tenggara. Dokumen itu diterbitkan Dinas Rahasia AS, CIA, yang kemudian dirilis majalah Time melaporkan rencana serangan itu dilakukan secara simultan bertepatan setahun tragedi 11 September.

Skenarionya, jaringan teroris itu akan mengirim truk bermuatan penuh bom yang siap menerjang kedutaan. Lubang besar bakal terjadi usai ledakan, disusul

serudukan truk berikutnya yang siap membumihanguskan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Info penting dari Al Faruq ini tidak berdiri sendiri, tapi diperkuat info dan agen intelijen CIA yang bertugas di Indonesia.

Dokumen itu menguak laporan lain. Al Faruq punya rencana menggemparkan, yakni dua kali bermaksud menghabisi Presiden Megawati. Rencana ini ditempuh lewat serangan bom yang ditenteng operatornya Taufik bin Abdul Halim alias Dani, yang keburu meledak di Atrium Senen, 1 Agustus 2001. Hanya saja info ini ditepis AKBP Carlo B. Tewu, Kepala Tim Anti Teror dan Bom Polda Metro Jaya, saat itu. Dikatakan, hasil pemeriksaan, Dani menyebut bosnya bernama Hambali, seorang warga Indonesia, asal Cianjur, Jawa Barat yang lama bermukim di Malaysia. Hambali diduga pentolan Jamaah Islamiyah di Malaysia, termasuk buron pasca tragedi 11 September. Jejaknya terlacak saat peledakan bom malam Natal, di Jakarta dan Bandung.

Taufik Abdul Halim alias Dani adalah warga negara Malaysia yang tinggal di Selangor. Masuk ke Ambon via Nunukan, Kalimantan untuk mendukung kelompok Islam yang sedang terlibat konflik di Ambon. Dari Ambon Dani masuk Jakarta via Surabaya dan tinggal di Jalan Malaka, Klender, Jakarta Timur bersama alumni Ambon lainnya. Saat peledakan di Atrium, Dani sebetulnya berniat meledakkan bus yang digunakan para tokoh Kristen Ambon yang saat itu mengadakan pertemuan di kompleks Atrium, Senen Jakarta Pusat, namun bom keburu meledak.

Info lain yang dianggap penting dari Al Faruq adalah mengaku punya hubungan dengan Abu Bakar Ba'asyir, pemimpin Pesantren Ngruki Solo. Ia juga

menyebutkan Agus Dwikama, yang ditahan di Filipina karena kasus kepemilikan bahan peledak dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara merupakan bagian dari jaringannya. Al Faruq mengatakan, Ba'asyir adalah dalang peledakan Masjid Istiqlal pada tahun 1999. Menurut pengakuan Al Faruq, Al Qaeda ada di belakang serangkaian peledakan bom Natal 2000. Namun Ba'asyir menolak semua pengakuan Faruq tersebut. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, pengasuh Pondok pesantren Ngruki Solo ini menegaskan dirinya tak kenal dengan Al Faruq.

Pengakuan Al Faruq telah menyudutkan posisi Indonesia sebagai “sarang terorisme internasional” ,sekaligus memberikan gambaran bahwa jaringan Al Qaeda bukan sekedar dugaan tanpa bukti. Pasalnya, Al-Faruq berhasil ditangkap bermula dari temuan informasi kepolisian Filipina.

Ceritanya awal Mei 2002, polisi Filipina melacak sambungan telepon seluler Agus Dwikarna yang menemukan hubungan ke sebuah nomor seluler di kawasan Bogor. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Filipina, intelijen Indonesia melacak pergerakan di nomor ponsel. Ternyata milik Mahmud bin Ahmad Assegaf nama lain Al-Faruq. Aparat keamanan dan imigrasi lalu bergerak meringkus Al-Faruq. Tuduhan yang dikenakan kepadanya adalah pelanggaran imigrasi. selanjutnya dia diserahkan ke pihak intelijen AS.

Sebelum dibawa intelijen AS, Faruq kepada intelijen Indonesia menyebut nama bosnya, Abu Daud, seorang pengusaha Jerman keturunan Arab, tinggal di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Tapi ketika polisi ke tempat itu, rumah sudah kosong. Setelah ditelusuri, Abu Daud pindah ke rumah kontrakan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta selatan. Diketahui ongkos sewa rumah itu 14 ribu Dollar

AS per tahun (sekitar Rp 125 juta). Abu Daud yang bernama asli Seyam Reda, sesuai paspor Jerman miliknya ditangan dan ditahan pihak kepolisian. Namun setelah mencocokkan foto, polisi memastikan orang itu bukanlah Abu Daud yang dicari. Walau begitu, sejumlah dokumen yang ditemukan di tempat itu memberi informasi penting, seperti kaset video latihan perang di poso, Ambon dan beberapa dokumen bukti pengiriman dan akses sejumlah yayasan. Rekaman" Majalah Tempo", 19/10/2003, yang mengutip laporan ICG No. 63 dan edisi 19/9/2004 Spanyol-Bogor

Parlindungan Siregar, seorang Warga Negara Indonesia, ditangkap polisi Spanyol dengan tuduhan anggota jaringan teroris. Di ponsel Parlindungan tercatat nomor ponsel Umar Al-Faruq. Ceritanya, saat ditahanan, Parlindungan diperkenankan membawa ponselnya. Selama ditahanan ia sempat beberapa kali merrelepon Faruq lewat HP. Pembicaraan sempat direkam Polisi Spanyol. Informasi penting ini dikirim pula kepada kepolisian Indonesia.

2. Bogor-Spanyol

Saat di tahanan, beberapa kali ponsel Parlindungan menerima sambungan telepon dari sebuah wartel di kawasan Bogor-Jawa Barat. Diduga wartel tersebut tak jauh dan rumah kediaman Al-Faruq.

3. Manila - Bogor

Awal Juni 2002, Polisi Filipina menangkap Agus Dwikarna, pemimpin Laskar Jundullah, yang disebut-sebut tertangkap basah membawa bahan peledak di kopernya. Di selnya, Agus membawa serta HP miliknya. Selama berada di sel,

Agus beberapa kali menelepon Al-Faruq melalui Handphone. Tapi Agus membantah hal ini.

4. Bogor - Manila

Sebuah ponsel dari kawasan Bogor terdeteksi beberapa kali menelepon ke ponsel Agus Dwikama. Telepon juga kerap datang dari Wartel yang tempatnya sama dengan nomor telepon yang masuk ke ponsel Parlindungan.

5. Chechnya

Nomor ponsel Umar Al-Faruq juga tertera di ponsel Ibnu al-Khattab, seorang komandan tentara Chechnya yang ditangkap Rusia.

6. Guantanamo - Kuba

Nomor telepon Umar Al-Faruq juga tertera di ponsel seorang anggota Taliban yang disel di Penjara X-Ray, Guantanamo-Kuba.

A. 2. CATATAN TERORISME DI INDONESIA SESUDAH TAHUN 1965

Beberapa catatan mengenai kejadian terorisme di Indonesia sesudah tahun 1965:

- Pembajakan terhadap pesawat MNA "Merauke" dengan tuntutan uang tebusan Rp. 20 juta. Pelaku seorang eks KKO, Pembajak berhasil ditembak mati oleh Capt. Pilot di Pelud Adi Sucipto.
- 20-10-1972 di Bukit Tinggi, Ditemukan bom waktu di WC RS Imanuel. Berisi 36 batang bahan peledak(TNT) merek "Giant Gelatin Atlas" eks Taiwan, sebuah

detonator, dua buah baterai dan jam tangan merk Garuda. Pelaku Golongan muda ekstrim "Angkatan Muda Mujahid Darul Islam"

- 11-11-1976 di Padang, Peledakan bom waktu di Masjid Nurul Imam, menggunakan bahan peledak (TNT) merek "Giant Gelatin Atlas" eks Taiwan, mengakibatkan kerusakan. Pelaku "Angkatan Muda Mujahid Darul Islam".
- 25-11-1976 di Medan, Peledakan di Gereja Methodis, di Jl. Nusantara pada pukul 20.30 WIB bertepatan jemaah selesai melakukan kebaktiann Natal. Korban tewas : empat orang anak, dan tiga orang dewasa. Selang beberapa menit terjadi lagi ledakan di lantai III aula SMP/SMA Perguruan Methodis Budi Murni, di samping Gereja Methodis, tapi tidak ada korban jiwa. Pukul 23.50 terjadi lagi ledakan di Bar Appolo lantai III di Jl. Bawean, 100 meter dari Gereja Methodis. Dua orang luka berat. Pelaku "Angkatan Muda Mujahid Darul Islam".
- . 26-12-1976 di Medan, Peledakan di gedung bioskop Riang (milik Pemda). Empat orang luka-luka berat dan ringan. Pelaku "Angkatan Muda Mujahid Darul Islam".
- 5-9-1977 di Jakarta, Pembajakan terhadap pesawat Garuda dalam penerbangan Jakarta-Surabaya. Pelaku "Trijudo". Motif : Frustasi. Pelaku berhasil dibekuk.
- 29-9-1977 di Jakarta, Peledakan dua bom di Percetakan Kencana di Jl. Salemba Kenari No. 4, mengakibatkan kerusakan ruangan. Bom ketiga tidak meledak. Pelaku tidak diketahui.
- 19-3-1978 di Jakarta, Peledakan bom di wc pria pada lantai IrI sekretariat MPR. Pelaku tidak diketahui. Terdapat sisa ledakan berupa pipa ledeng panjang 60 cm dan garis tengah 2,5 cm.

- 20-3-1978 di Jakarta, Berhasil diendus perencanaan teror di pusat-pusat pertokoan, rumah-rumah pejabat dan tempat-tempat vital lain. pelaku tidak diketahui. Ditangkap 36 orang (mahasiswa, sarjana, guru agama Islam). Anggota "Gerakan Pemuda Islam" (GPI) diduga terlibat.
- 14-4-1978 di Jakarta, Peledakan bom plastik sehingga merusak bagian tempat imam dan tangga menuju mimbar dari Masjid Istiqlal pada pukul 20.35. pelaku tidak diketahui.
- . 28-4-1978 di Jakarta, Peledakan lima bom plastik pukul 20.30 di Theater Terbuka Taman Ismail Marjuki saat Pembacaan Puisi oleh WS. Rendra. Pelaku tidak diketahui.
- 16-8-1980 di Padang Sidempuan, Sebuah ledakan via paket kiriman yang diantar penarik becak dan diterima Toko Obat "Cahaya" mengakibatkan dua orang luka berat. Pelaku tiga orang pemuda hanya tidak ditangkap. Paket lainnya diterima Toko "Evy" hanya tidak meledak. Terdiri dari dua baterai senter, kawat listrik, amunisi dan premium.
- 15-8-1980, Percobaan pembakaran di kompartemen bagasi pada pesawat Garuda DC-9 No. GA.482 yang sedang dalam penerbangan Jakarta-Surabaya, namun pesawat berhasil mendarat di Surabaya. Motif : Sabotase, alat yang digunakan antara lain bahan bakar "Super 98".
- 26-8-1980 Percobaan pembakaran di kompartemen bagasi pada pesawat Mandala New Electra No. QH 199 dalam penerbangan Jakarta-Surabaya namun pesawat

berhasil mendarat di Surabaya. Motif : Sabotase, alat yang digunakan antara lain bahan bakar "Premium".

- 27-8-1980 di Jakarta, Ledakan hebat menghancurkan beberapa ruangan ICCU RS. Cipto Mangunkusumo sekitar 21.01 WIB. Dua karyawan RS luka berat, namun empat pasien jantung selamat. Asap memenuhi ruangan disertai bau mesiu menusuk.
- 15-12-1980 di Padang Sidempuan, Peledakan diduga berasal dari bom waktu di Pengadilan Negeri di Padang Sidempuan. Terjadi kerusakan/kebakaran sebagian gedungnya.
- 28-3-1981 Pembajakan Pesawat Garuda PK-GNJ "WOYLA" dengan nomor penerbangan GA-206, sekitar pukul 10.10 WIB dalam penerbangan Jakarta-Palembang-Medan sisi 25 mil sebelum Pekanbaru dipaksa mendarat di Penang, Malaysia. Pesawat tersebut berangkat dari Jakarta pukul 08.00 WIB dengan awak : Pilot Herman Rante, Co-Pilot Hendhy Juwantoro, dan Pramugari : Lidya Retno, Deliyanti, serta 43 penumpang (ada yang turun di Palembang) dan 14 penumpang naik dari Palembang. Setelah mengisi bahan bakar di Penang, pesawat diperintahkan terbang ke Bangkok dan mendarat di Don Muang Airport.
- 29-3-1981 Seorang penumpang warga negara Inggris Robert Wainwright berhasil menyelamatkan diri dari pesawat Garuda PK-GNJ "WOYLA" yang dikuasai pembajak, namun seorang penumpang WN AS, Carl Schneider tertembak saat berusaha menyelamatkan diri. Para pembajak menuntut pemerintah RI membebaskan 80 tahanan yang terlibat dalam kasus teror sebelumnya, termasuk aksi penyerangan terhadap Kosekta Cicendo, Bandung. Mereka minta

diterbangkan ke beberapa negara di luar negeri yang disebutkan kemudian. Pembajak menuntut pula disediakan uang 1,5juta Dollar AS. Untuk melakukan operasi penyelamatan, Pemerintah pada 29-3-1981 mengirim satuan khusus anti teror, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Muangthai. Pelaku lima orang bersenjata pistol, granat dan senjata tajam yaitu :

Mahrizal, Abu Sofian, Zulfkar, Abdullah Mulyana, Wendi (dari kelompok ekstrem yang dipimpin Imron). Para pembajak naik dari Palembang Di Penang pembajakmenurunkan seorang penumpang wanita (76 tahun). Dalam operasi pembebasan seorang anggota pasukan" Kirang" tertembak pembajak dibagian bawah perut, dan Pilot Herman Rante pada kepalanya.Keduanya meninggal dunia.

- 14-10-1982 di Jakarta, Peledakan bom waktu di depan rumah Kol. CPM (Purn.) Kaffrawi di Jl. Harapan Mulya IV No. 8, Jakarta Pusat. Pintu rumah rusak dan lantai semen berlubang sedalam 1 cm, lebar 30 cm, tidak ada korban jiwa. Ditemukan: pecahan tabung dari logam,panjang garis tengah 7 cm, berisi bubuk sendaw4 portos dan belerang, diperkirakan bervolume 1 kg. Sumber api dari empat buah baterai ukuran sedang kekuatan 6 volt. Bahan peledak diperkirakan buatan sendiri yang dilengkapi dengan sistem elektrik mekanis/bom waktu. Cara kerjanya diperkirakan bahan peledak dihubungkan kabel ke sumber arus (baterai) yang dihubungkan ke timer. Untuk mengatur ketepatan waktu peledakan, dibungkus kertas menjadi satu. Kemampuan bom tersebut mencapai radius lima meter, dan pecahan mencapai 10 meter. Kaffrawi pernah menjadi anggota DPR dari fraksi ABRI periode 1972-1977. Pelaku tidak diketahui.

- 18-3-1983, di Aceh Timur, Paket pos meledak di stasiun bus sewaktu petugas memisahkan barang kiriman pos. Korban tidak ada. Tercantum nama H.A Salam, pengusaha Depot Obat Jasa Peureulak, sebagai pengirim yang ditujukan kepada Zulkifli BA, seorang guru SMA. Setelah di Checking H.A Salam tidak pernah mengirim paket. Menurut Kepala Kantor Pos Abdul Wahab, paket diterima kantor pos pada 16-3-1983. Pada 17-3-1983 kiriman paket tiba di Langsa dan diteruskan ke Idi via bus. Paket pos berisi sebuah kotak triplex yang dimasukkan dalam kotak bekas jamu ginseng ukuran 2A x 20 cm, dengan kabel-kabel berwarna merah dan serbuk mesiu. Pelaku belum diketahui.
- 13-4-1983 di Bandung, Peledakan bom di jembatan yang menghubungkan Alun-alun Bandung dengan Masjid Agung. Menimbulkan kerusakan, tiga orang luka ringan. Pelaku tidak diketahui. Aksi terorisme dengan peledakan bom pasca reformasi memiliki bentuk, motif, sasaran serta spesifikasi pelakunya sendiri.

Rentetan bom pasca reformasi bisa diurut dari tahun 2000-2004 :

1. Peledakan Bom di Medan, Sumatera Utara 28 Mei 2000 :

- o Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI).
- o Gereja HKBP.
- o Gereja Katolik Kristus Raja.

29 Mei 2000 :

- o Rumah Makan Miramar di Jalan Pemuda.

20 Agustus 2000 :

- o Gereja Kemenangan Iman Indonesia (KII).

27 Agustus 2000 :

o Jalan Bahagia dan kediaman Pendeta J . Sitorus.

o Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).

12 November 2000 :

o Gedung ISTP Dharma Agung.

25 Desember 2000 :

o Rumah Pendeta E l Imanson,J l. Kasuari.

Pelaku: Edy Sugiharto(11 tahun penjara). Jenis Bom : Rakitan berisikan belerang dan gotri.

2. Peledakan Bom di Batam, Riau

24 Desember 2000 :

o Gereja Katolik Beato Damian, Bengkong.

. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sungai Panas.

. Gereja Bethany lantai II Gedung My Mart Batam Cantre.

. Gereja Pentakosta di Indonesia Pelita,di Jl. Teuku Umar.

2 Desember 2001 :

. Gereja di Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

3. Peledakan Bom di Pekanbaru, Riau

24 Desember 2000 :

. Gereja HKBP Pekanbaru, Jalan Hang Tua.

. Gereja Jalan Sidomulyo.

4. Peledakan Bom di Kudus, Jawa Tengah

26 Desember 2000 :

. Gereja Santo Yohanes Evangelista Jalan Sunan Muria 6.

5. Peledakan Bom di Mojokerto, Jawa Timur

24 Desember 2000 :

. Gereja Allah Bailq Jl. Tjokroaminoto.

o Gereja Santo Yosef, Jalan Pemuda.

o Gereja Bethany.

. Gereja Ebenezer, Jalan Kartini.

6. Peledakan Bom di Jawa Barat

24 Desember 2001 :

o Pertokoan Cicadas, Bandung.

o Jalan Terusan Jakarta" 43 Bandung.²⁹

. Gereja Pentakosta Sidang Kristus, Jalan Masjid, 20, Alun-alun Utara Sukabumi.

o Pangandaran Ciamis.

7. Peledakan Bom di Bali

12 Oktober 2002

Terjadi tiga ledakan bom di Bali. Dua ledakan di Jalan Legian dan satu lagi sekitar 100 meter dari Konsulat AS, Denpasar. Sebanyak 202 orang tewas.

Tersangka antara lain, Mukhlis, Imam Samudra, Amrozi, Abdul Rauf.

1 Oktober 2005 :

Terjadi lagi bom di Bali. Tiga ledakan bom mengguncang kawasan wisata. 26 orang tewas dan 140-an orang luka-luka.

12 Oktober 2002:

o Sari Club dan Peddy's Cafe, Kuta.

8. Peledakan Bom di Mataram, NTB

14 Oktober 2000 :

- o Perusahaan Tambang Emas Newmont.
- o Gereja Protestan Indonesia Barat Imanuel, Jalan Bung Karno.
- . Gereja Betlehem Pentakosta Pusat Surabaya(GBPPS).
- o Pekuburan Kristen Kapitan Amenam.

9. Peledakan Bom di Jakarta

22 Juli 2000:

- . Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Jatiwaringin, Jakarta Timur.

Agustus 2000 :

Kediaman Duta Besar Filipina Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

24 Desember 2000 :

Gereja Katedral.

- . Gereja Kanisius Menteng Raya.

Gereja Matraman.

Gereja Koinonia, Jatinegara.

- . Gereja Oikumene Halim.

Agustus 2001 :

- o Atrium Sonen, Jakarta Pusat.

9 November 2001 :

- . Gereja Petra, Jakarta Utara.

1 Januari 2002 :

o Ledakan keras di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta Selatan. Satu orang tewas. Polisi menetapkan Hasbullah dan Tarmizi sebagai tersangka.

22 Juli 2002:

. Gereja Santa Ana, Jakarta Timur.

5 Agustus 2003 :

o Terjadi ledakan bom mobil di loby Hotel Marriott Jakarta. 12orang meninggal dan 152 luka-luka. Tersangka antara lain, Dr. Azahari, Noordin Top, Asmarlatin Sani.

9 November 20A4 z

o Ledakan di depan Kantor Kedubes Ausfali4 Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

10. Peledakan Bom di Sulawesi Selatan

5 Desember 2002, di Makasar

Terjadi dua ledakan bom di Makasar Sulsel. Ledakan pertama di Restoran McDonald's di lantai dasar Mal Mari di Jl. Sam Ratulangie, Makasar. 3 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka.

Ledakan kedua terjadi di ruang pameran Toyota NV Hadji Kalla di Jl. Urip Sumoharjo Makasar Sulawesi Selatan.

10 Januari 2004 di Palopo, Sulsel.

Ledakan bom di Kafe Sampoddo Indah, Palopo, Sulsel. Empat orang tewas, tiga luka-luka. Tersangka 12 orang diantaranya bernama Yasmin.

Peledakan Bom di Sulawesi Tengah

28 Mei 2005, di Poso, Sulteng.

o Terjadi dua ledakan bom di Poso, Sulteng. Kedua ledakan itu terjadi di Pasar Tentena dan di dekat BRI unit Tentena. 21 orang tewas.

JEJAK AKSI TERORIS DI INDONESIA

Perang menumpas teroris dimotori AS menjalar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Badan intelijen berbagai negara bekerja sama untuk menangkap teroris. Berikut beberapa informasi terkait dengan dugaan jaringan teroris.¹⁸

13 Desember 2001

Parlindungan Siregar, Warga Negara Indonesia, disebut polisi Spanyol pernah membantu latihan militer sejumlah warga keturunan Arab di Poso. Dia akhirnya ditangkap di Madrid dan Granada, Spanyol.

19 November 2001

AS menangkap Agus Budiman dengan tuduhan sebagai *contac person* dari Muhammad Atta, salah satu pembajak 11 September 2001. Namun 9 (sembilan) bulan kemudian Agus dibebaskan.

11 Desember 2001

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono membeberkan adanya kamp latihan teroris di Poso, berdasarkan informasi dari Spanyol.

17 Desember 2001.

Singapura menangkap 13 tersangka anggota Jamaah Islamiyah. Mereka menceritakan peranan Abu Bakar Ba'asyir dan Hambali alias Riduan Isamuddin sebagai pemimpinnya. Hambali merupakan buronan Indonesia atas peledakan

¹⁸ Majalah Tempo, Edisi 29 September 2002

sejumlah gereja pada malam Natal 2000. Namun Ba'asyir sendiri membantah pengakuan ini.

9 Januari 2002

Muhammad Saad Iqbal Madni, seorang tokoh Al Qaeda ditangkap intelijen Indonesia di Matraman, Jakarta Timur. Madni selanjutnya dikirim ke Kairo, Mesir dengan pesawat carteran intelijen AS.

15 Januari 2002

Fathur Rahman Al-Ghozi, Warga Negara Indonesia ditangkap dengan tuduhan menyimpan satu ton bahan peledak dan penyerangan di Manila dan Singapura. Mantan santri Pesantren Al Mukmin di Ngruki, Sukoharjo akhirnya divonis 10 tahun di penjara Filipina. Sempat melarikan diri dari penjara namun akhirnya berhasil ditemukan dan ditembak mati aparat keamanan Filipina. Jenazahnya dibawa kembali dan dikuburkan dikampung halamannya di Jawa Timur.

7 Februari 2002

Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani nota kesepahaman kerjasama antiteror. Tukar menukar informasi menjadi salah satu pokok kesepakatan antara kedua negara.

11 Februari 2002

The Straits Times membeberkan "Dokumen Jibril" yang berisi rencana penyerangan anggota Jamaah Islamiyah terhadap berbagai sasaran di Singapura, Malaysia dan Indonesia pada 4 Desember 2001.

18 Februari 2002

Menteri Senior Singapura "Lee Kuan Yew" menuding Indonesia sebagai sarang teroris dan menyebut Abu Bakar Ba'syir sebagai pemimpin Jamaah Islamiyah. Informasi itu digali dari anggota Jamaah Islamiyah yang mendekam di tahanan Singapura.

15 Maret 2002

Direktur FBI *Robert Muller*, mengadakan dialog dengan Kapolri Da'i Bachtiar dan Menkopolkam saat itu, Susilo Bambang Yudoyono di Bali.

20 Februari 2002

Pemerintah Yaman membebaskan 20 pelajar asal Indonesia yang belajar di Perguruan Darul Hadits Ma'rif. Mereka ditahan karena diduga terlibat Al Qaeda.

25 Februari 2002

Polisi Malaysia menahan empat Warga Negara Indonesia yang diduga menjadi aktivis Islam garis keras dan terlibat aksi teror bom.

3 Maret 2002

Tim kepolisian Malaysia berangkat ke Jakarta untuk bertukar informasi menyelidiki keterlibatan Hambali.

14 Maret 2002

Panglima Laskar Jundalla Makassar, Agus Dwikarna ditangkap bersama Tamsil Lindrung dan Jamal Balfas di Bandara Ninoy, Manila dengan tuduhan membawa bahan peledak dan masuk secara ilegal. Balfas dan Lindrung kemudian bebas, tapi Agus dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda 50 peso.

9 April 2002

Lima buron anggota Al Qaeda di bawah pimpinan warga Singapura, Mas Selamat Kastari, diduga kabur ke Medan, Sumut.

5 Mei 2002

Presiden Megawati dan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark, mengadakan pembicaraan tentang kerja sama antiteror di Jakarta.

7 Mei 2002

Indonesia - Malaysia dan Filipina menandatangani perjanjian kerja sama informasi dan komunikasi dalam gerakan antiteror di Kuala Lumpur.

10 Mei 2002

Taufik bin Abdul Hakim alias Dani divonis hukuman mati dalam kasus peledakan Plaza Atrium , Senen. Dalam putusan banding, hukuman menjadi 20 tahun. Al-Faruq saat diinterogasi intelijen AS menyebut bom yang ada pada Dani dimaksudkan untuk membunuh Presiden Megawati.

13 Mei 2002

Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, mengusulkan penghapusan embargo militer untuk Indonesia. Kongres AS mengisyaratkan persetujuan dana bantuan US\$ 1 juta untuk pengembangan kemampuan antiteror bagi ajaran kepolisian Indonesia.

23 Mei 2002

Pemerintah mengakui kendala perumusan definisi terorisme, antarlain yang membuat pembahasan RUU Antiteror terkatung-katung.

27 Mei 2002

Empat kapal perang AS merapat di Surabaya. Armada ini kabarnya masuk dalam daftar sasaran Al-Faruq.

29 Mei 2002

Wakil Presiden Hamzah Haz bertemu Abu Bakar Ba'syir di Ngruki, Jawa Tengah dan menegaskan Indonesia bukan sarang teroris seperti ditudingkan Lee Kuan Yew.

Juni 2002

Pertemuan antar-petinggi intelijen se-ASEAN di Jakarta. Muncul gagasan untuk tukar-menukar informasi, dengan bantuan AS menberantas gerakan terorisme. Dalam pertemuan lain di Brunei dan Malaysia, komitmen serupa kembali ditegaskan.

5 Juni 2002

Al-Faruq ditangkap di Bogor dan diterbangkan ke pangkalan militer AS di Bagram, Afghanistan.

14 Juni 2002

Presiden Megawati membahas kemungkinan kerja sama antiteror dengan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair di London.

20 Juli 2002

Warga Yordania Umar Sani ditangkap di Bandara Detroit, Michigan. Polisi menudingnya sebagai pentolan Al Qaeda yang sedang melakukan perjalanan dari Indonesia ke AS. Ketika itu ia membawa cek.

24 Juli 2002

Presiden George Bush menelepon Presiden Megawati. Selain mengabarkan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Colin Powel, Bush juga berterimakasih atas dukungan Indonesia pada gerakan melawan terorisme.

1 Agustus 2002

Menteri Luar Negeri AS, Colin Powel bertemu Presiden Megawati dan sejumlah tokoh Islam di Jakarta.

9 September 2002

Tersangka Al Qaeda, Umar Al-Faruq sesuai dengan dokumen Badan Intelijen AS (CIA), mengakui ingin menyerang sejumlah perwakilan AS di Asia Tenggara dan armada AS yang tengah merapat di Surabaya. Al-Faruq juga membeberkan rencana pembunuhan terhadap Presiden Megawati oleh kaki tangannya di Indonesia.

10 September 2002

Kedubes AS di Jakarta dan Konsulat Jenderal AS di Surabaya ditutup menyusul informasi Al-Faruq tentang aksi balasan terhadap perwakilan AS di Asia Tenggara.

14 September 2002

Filipina menangkap empat warga Indonesia : Oskar Makawata, Rahman Yanis, Jaka Antarani dan Julkri Letemboba, Semula tuduhan pelanggaran imigrasi. Belakangan Oskar dituding terlibat pengeboman pusat perbelanjaan Fit Mart di General Santos Filipina.

18 September 2002

Polisi menahan Seyam Reda, yang diduga atasan Al-Faruq dengan dakwaan pelanggaran imigrasi. Warga Jerman keturunan Arab ini ditangkap di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Reda memiliki lima keping video berisi latihan bersenjata oleh warga sipil.

KONFIGURASI JARINGAN TERORIS DI INDONESIA

Awalnya aparat keamanan kesulitan menjelaskan secara lugas ke publik bagaimana pola, struktur dan siapa saja anggota pelaku bom malam Natal tahun 2000, dan peledakan bom lainnya di sejumlah kota di Indonesia. Sindikat jaringan itu mulai terkuak, ketika 5 Juni 2002, intelijen Indonesia bekerjasama dengan intelijen asing berhasil menangkap Umar Al-Faruq, pria asal Kuwait di daerah Bogor. Beristrikan warga Bogor, Mira Agustina dan mempunyai dua putra dari perkawinan mereka. Ditangkap dengan tuduhan melanggar izin imigrasi, Al-Faruq dideportasi ke Malaysia (menurut versi resmi pemerintah) lalu diterbangkan kepenjara di Guantanamo-Kuba oleh pihak AS.

Setelah tiga bulan disekap dalam penjara, Al-Faruq akhirnya buka suara. Majalah Time edisi 23 September 2002 memuat laporan utama, kisah menggemparkan yang selama ini hanya diketahui komunitas intelijen. Mengutip dokumen Dinas Rahasia AS (CIA), Time menulis pengakuan Al-Faruq, yang tercatat sebagai penduduk Desa Cijambu, Cijeruk, Jawa Barat Menurut dokumen itu, posisi Al Faruq lebih dari sekadar operator. Dia adalah petinggi Al Qaeda untuk kawasan Asia Tenggara. Selain terlibat dalam perencanaan penembakan terhadap Megawati, Al-Faruq mengaku terlibat dalam peledakan bom di sejumlah

kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000 serta merencanakan peledakan sejumlah sarana milik AS di Singapura dan Indonesia.

Al Faruq mengatakan bahwa Ba'asyir adalah dalang peledakan Masjid Istiqlal pada tahun 1999, dan Al Qaeda ada di belakang serangkaian bom Natal 2000. Namun dalam wawancaranya di MajalahTempo edisi 29 september 2002, Ba'asyir mengaku tak kenal dengan Al Faruq. Berbekal informasi awal itu, upaya mengungkap tabir peledakan bom di Tanah Air terbuka lebar. Seperti rangkaian peledakan di Bali, Hotel JW Marriott hingga bom di depan Kedubes Aushalia di Jakarta.

Memang puluhan pelaku telah berhasil dibekuk aparat kepolisian, namun pentolan utama jaringan teroris di Indonesia masih berkeliaran bebas, seperti Dr. Azhari dan Noordin M. Top, ahli perakit bom, alurnni Afganistan yang termasuk pimpinan teras JI di Asia Tenggara.

Sidney Jones¹⁹, m enjelaskan, Jemaah Islamiyyah beroperasi lewat beberapa ringan utama. Mereka bergerak dalam hubungan keluarga dan lewat jaringan lainnya, yaitu alumni Ngruki-Darussyahada. Dalam bom Hotel JW Maniott Jakarta misalnya Noordin tampaknya bertindak sebagai konseptor dan Azhari sebagai komandan lapangan. Perencanaan digarap sejak Desember 2003, delapan bulan sebelum peledakan bom. Aksi ini dipicu oleh desakan Tony Togar: seorang anggota JI di Medan. Dia ingin cepat-cepat mengeluarkan bom yang disimpan di rumahnya karena kuatir akan keselamatan dirinya setelah pelaku bom Bali ditangkap kepolisian.

¹⁹ Majalah Pilar Edisi 14-20 Juli 2003

Dikisahkan, awalnya Tony Togar bermaksud mengeluarkan bahan peledak dari rumahnya. Dia menelepon Heru Setiawan- seorang anggota JI dari Jawa Timur yang saat itu bekerja di Semarang bersama Mustofa, Kepala Satuan Khusus JI. Heru lalu mengatakan bersedia menitipkan bahan peledak tersebut di rumahnya di Dumai. Noordin dan Azhari merekrut beberapa orang yang masuk ke jaringan sel peledakan bom Hotel JW Marriott Jakarta, yaitu wakalah (cabang) JI di Johor punya hubungan erat dengan anggota JI di Pekanbaru dan Dumai. Noordin dan Azhari, keduanya aktif di Wakala Johor. Mereka punya hubungan erat dengan Pesantren Lukmanul Hakiem di Johor, pusat perekrutan kader sejak awal 1990-an. Noordin mulai mengajar di sana pada tahun 1994, sedang Azharimenjadi bagian dari kelompok pengajian yang dibentuk oleh Abdullah Sungkar, pendiri JI jauh sebelumnya. Begitu juga Muhamad Rais dan Moh. Ikhwan, dua orang yang kemudian bergabung dengan tim Marriott. Kedua orang ini pernah belajar di Persantren Lukman al-Hakiem ketika Noordin ada di sana.

Selain itu, Kepala JI di Pekanbaru yang terlibat dalam bom malam Natal 2000, dan bom Marriott adalah mertua Joni alias Idris, pelaku bom Bali yang juga ikut membantu pelaksanaan bom Marriott. Mohamad Rais kawin dengan saudara perempuan seorang anggota JI di Malaysia yang mana ayahnya juga terlibat. Ikatan semacam inilah menjamin anggota tim yang buron tidak mengalami kesulitan mendapat nafkah hidup sehari-hari.

Seperti ditulis Sydney pada Maret 2003, ketika Mohamad Rais terpaksa meninggalkan Malaysia setelah ipar laki-lakinya ditangkap karena terlibat suatu perkara. Noordin datang membantunya membuka usaha bengkel reparasi di

Bukittinggi. Di tempat ini, Rais, menurut dokumen pengadilan menyimpan dana sekitar 40 ribu ringgit Malaysia untuk membiayai kegiatan JI. Begitulah caranya jaringan itu mengikat kebersamaan di antara mereka.

Selain itu ada dua jaringan lagi di Indonesia menurut Direktur ICG ini yang mungkin dimanfaatkan Azhari dan Noordin. Walau jaringan ini tidak begitu menonjol, namun berperan besar dalam bom Hotel JW Marriott. Mereka adalah alumni Mindanao dan veteran konflik di Ambon dan Poso. Orang yang pernah ikut di Ambon bersama Laskar Mujahidin atau di Poso bersama Laskar Jundullah, atau berperan dalam konflik lain, terbuka untuk direkrut. Demikian pula orang yang pernah dilatih di Mindanao pada periode 1997 - 2003, apakah ia anggota JI atau bukan, dapat dijadikan sumber untuk mencari dukungan, tempat sembunyi atau bantuan lainnya. Dengan loyalitas dan saling melindungi sesama anggota jaringan membuat Azhari dan Noordin sulit dibekuk kepolisian.

Masih ditelusuri apa peran yang dimainkan komando sentral atau qidah markaziyah JI dalam bom Marriott. Diduga ada keterlibatan tokoh-tokoh senior JI di luar Noordin dan Azhari. Juni 2003, misalnya" ketika rencana bom Marriott sudah bergulir, Noordin dan Azhari mengadakan pertemuan dengan Abu Dujana dan Qatada dari komando sentral. Abu Dujana pernah menjadi guru di Pesantren Lukmanul Hakiem, di tempat itulah ia berhubungan erat dengan Noordin. Sedang Qatada terlibat dalam pelatihan unit khusus JI pada tahun 2003.

Unit khusus itu dirancang untuk membangun kembali kepakaran JI, terutama di bidang pembuatan bom yang menjadi kacau pasca panangkapan para pelaku bom Bali. Pada Januari 2003 Qatada bersama Azhari dan Noordin

membahas rencana melatih satuan khusus dengan target operasi melawan Amerika. Target operasi lainnya meledakkan bom di sejumlah bank swasta, aset ekonomi orang-orang asing, terutama AS, tempat-tempat maksiat seperti diskotek dan bar, serta markas besar kepolisian.

Estimasi intelijen menunjukkan cukup banyak orang Indonesia yang terlatih meracik bom. Menurut Direktur ICG Sydney Jones jumlah orang Indonesia yang terlatih merakit bom sangat menakutkan. Diperkirakan lebih dari 200 orang telah menjalani pelatihan di akademi militer pimpinan salah satu panglima Mujahidin Afganistan, Abdul Rasul Sayyaf di perbatasan Pakistan - Afganistan periode 1985 -1995. Di kamp-kamp militer semacam inilah pemimpin JI membangun hubungan erat dengan sejumlah orang, yang kelak menjadi tokoh senior Al Qaeda.

Kalau kita telisik, bahan baku bom relatif mudah diperoleh di Indonesia. Ambil contoh dengan bahan bom yang dipergunakan meledakkan Bali, ternyata dibeli di sebuah toko kimia di Surabaya. Dengan relatif gampangya diperoleh bahan bom, memberi peluang subumya terorisme di tanah air. Tersedianya bahan-bahan peledak merupakan perpaduan antara tersedianya di pasaran bebas dan kemungkinan kebocoran di gudang-gudang persenjataan militer. Keahlian lain yang belum dipraktikkan JI adalah kemampuan pengikutnya dalam hal menembak. Yang perlu dicermati, apakah ada hubungan latihan menembak anggota JI dengan ditemukan kepolisian sejumlah senjata api dan peluru di Semarang dan Lamongan?

Rencana pembunuhan Duta Besar Filipina di Jakarta didiskusikan pada tahun 2000, kata Jones, para anggota JI berdebat apakah mereka akan melakukan pengeboman atau penembakan. Akhirnya diputuskan dengan cara pengeboman. Pertimbangannya meledakkan bom dengan remote control lebih memudahkan eksekutor melarikan diri, ketimbang menggunakan senapan. Karena itu, kalau sampai saat ini belum ada pembunuhan lewat penembakan senjata api yang menonjol, tidak berarti pilihan lewat operasi itu tidak digunakan. Ke depan, pilihan teroris menggunakan senapan membunuh target terbuka lebar manakala ruang gerak teroris melakukan pemboman makin ketat.

Bom Bali, Marriott dan di depan Kedubes Australia mempertontonkan hasil karya dan master II, Dr. Azhari dari Malaysia dan Dulmatin dari Indonesia, keduanya pernah berlatih di Afganistan. Namun JI tidak selalu membutuhkan superstar untuk menciptakan bencana. Lewat operasi bom Makasar para pelaku gembungan sesaat bisa beraksi sendiri. Dalam kesimpulan ini, walau beberapa orang penting JI sudah ditangkap aparat, tapi aktivis terlatih lainnya masih berkeliaran bebas yang mampu menebar bom kapan saja dan di mana saja.

Menurut informasi intelijen, JI masih mempertahankan jaringan pendukung di wilayah-wilayah yang dapat menyediakan tempat persembunyian dan rekrutmen kader baru. Contohnya begitu mudahnya Fathur Rahman al-Ghozi kabur dari penjara Manila dan menghilang ke Mindanao. Walaupun akhirnya berhasil ditembak, tapi hal itu menggambarkan kuatnya jaringan JI di Filipina. Keadaan serupa boleh jadi ada di Indonesia. Sampai saat ini belum berhasil ditangkapnya Dr. Azhari dan Noordin Top, bisa menjelaskan asumsi atau

anggapan ini. Bukan tidak mungkin dalam proses pelarian, mereka akan terus merekrut dan melatih kader baru bagi Jemaah Islamiyah.

Para pengembom, mulai dari Bali, Marriott, Makassar hingga depan Kedubes Australia di Jakarta, melibatkan pembom bunuh diri. Pengebom bunuh diri mungkin akan lahir lebih banyak lagi pada masa datang. Dengan fenomena sosial politik nasional serta internasional yang terus bereskalasi, diperkirakan intelijen sesuai data dan informasi menyebutkan, ancaman bom bunuh diri mengusung label agama tertentu, masih sulit dihentikan. Karena itu tantangan mengatasi bom bunuh diri masih sangat serius dan urgen.

Database dan analisis intelijen menunjukkan, selain sangat berani dan nekat, sistem pengorganisasian teroris sangat tertutup karena bekerja dengan sistem sel antara satu daerah dengan daerah lainnya. Masing-masing wilayah bekerja sesuai program yang telah disusun. Misalnya untuk daerah Jawa Tengah, salah satu dokumen memperlihatkan struktur dan gerak sel hidup Waskalah Jawi Wustho sejak 1999. Mereka membagi wilayah Jawi Wustho ke dalam enam koordinator wilayah. Masing-masing merupakan satu eks keresidenan, lengkap dengan proses dan tahap pekerjaan yang harus dicapai. Terungkap pula program kerja wilayah Jawi Wustho 25 tahun ke depan, lengkap dengan taktik dan strategi setiap periode.

**a. 3. UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN TERORIS
DALAM MENIMBULKAN EFEK JERA**

Di tengah tekanan luar negeri atas tudingan sebagai negara tempat persembunyian teroris internasional, pemerintah mengambil langkah berani, tegas dan cepat. Selang beberapa hari terjadinya bom Bali, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 tentang Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali. Pada 6 Maret 2003, DPR mengesahkan Perpu No.1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan Perpu No.2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2003.

Atas dasar hukum ini aparat hukum melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan vonis buat para pelaku.' Namun UU di atas akhirnya dibatalkan pada 23 Juli 2004. Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 16 tahun 2003. Masykur Abdul Kadir, salah seorang pelaku yang sudah divonis 15 tahun penjara melakukan uji material terhadap UU No.15 tahun 2003. Lima dari sembilan anggota majelis hakim Konstitusi, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menerima pertimbangan pemberlakuan asas retroaktif atau berlaku surut tidak sesuai dengan peristiwa bom Bali, yang dikatakan belum termasuk kejahatan luar biasa.

Walau demikian, sebagian besar pelaku yang berhasil ditangkap aparat, setelah melewati proses pengadilan sudah dijatuhi hukuman. Begitu pula para pelaku bom Bali diputuskan bersalah dengan hukuman bervariasi, dan hukum mati, penjara seumur hidup hingga tahanan beberapa tahun. Sesuai hasil

pemeriksaan, para pelaku teroris dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain :

- **Kepentingan Politik**

Metode teror terbukti efektif untuk menekan dan memberikan dampak yang meluas. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka teror menjadi salah satu bentuk apresiasi kepentingan politik yang paling serius untuk menekan lawan-lawan politik di tingkat elit politik. Risiko pertarungan ini adalah dikorbankannya kepentingan publik karena waktu dan energinya tersedot untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing antar-elit politik.

Kalau situasi politik ikut memicu terjadinya teror bom – bisa memunculkan sebuah dugaan bahwa peledakan bom di sejumlah tempat dan daerah - kemungkinan merupakan bagian dan bentuk-bentuk pertarungan pada tingkat elit politik. Negara invalid, akibatnya fungsi dan peran negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kekuatan-kekuatan politik bertarung pada berbagai level dengan berbagai cara. Patut diduga di antaranya ada yang menggunakan mekanisme teror untuk kepentingannya sehingga menyulitkan pembongkaran mata rantai antara pelaku dan penanggungjawab.

Dari analisis intelijen, tantangan yang dihadapi dalam masa transisi demokrasi ini adalah memelihara momentum pelebagaan demokratisasi; menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis; menyepakati kembali makna penting persatuan nasional; menyelesaikan masalahmasalah politik sensitif yang tersisa; menyempumakan reformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri; menyelesaikan rekonsiliasi nasional; menjadikan pendidikan

politik sebagai alat transformasi sosial menuju demokrasi; serta melembagakan kebebasan pers/mediamassa.

Dalam konstelasi geo politik dan geostrategi internasional, hubungan luar negeri dihadapkan pada tantangan serius. Yaitu, bagaimana memanfaatkan potensi strategis Indonesia secara maksimal dalam konstelasi politik global dengan mengedepankan *geographic credential* bagi kepentingan nasional; menggunakan politik luar negeri untuk mempercepat pemulihan krisis nasional; menempatkan Indonesia secara tepat atas isu-isu global; memulihkan *strategic centrality* Indonesia; revitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri; mencari posisi yang tepat dalam rivalitas antar kekuatan-kekuatan adidaya dunia.

Selain itu Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bagaimana mendorong perkembangan ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil; menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi potensi konflik teritorial dengan negara tetangga; memperkuat makna penting multilateralisme secara global; meningkatkan dukungan dari berbagai pelaku bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Dalam mengatasi berbagai tantangan hubungan luar negeri, terutama yang menyangkut geopolitik pelaksanaan politik luar negeri selalu mendasarkan diri pada konstelasi politik dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan globalisasi, kelompok teroris mendapat keuntungan secara tidak langsung. Program globalisasi memperluas akses berbagai kelompok ini melintasi batas negara. Kedua, kelompok teroris juga

memiliki akses lebih luas untuk pendanaan baik yang legal seperti melalui berbagai kelompok usaha dan lembaga-lembaga non-profit maupun kelompok bisnis ilegal. Selain itu, kelompok teroris kontemporer dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa misi mereka adalah menghadapi kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya yang menurut mereka membawa dampak buruk dan mengancam identitas kelompoknya.

Dalam kaitan ini, menarik untuk mempelajari temuan United Nations Development Program (UNDP,) bahwa kawasan yang memiliki indeks *human development* terendah memiliki kecenderungan dekat dengan kelompok-kelompok teroris. Sebab utamanya karena warga di kawasan ini merasa tidak mendapat keuntungan dan kemakmuran yang dijanjikan oleh proses globalisasi dan akses untuk kebebasan. Akibatnya adalah meluasnya antipati pada Amerika Serikat yang dipersepsikan sebagai mesin utama proses globalisasi"

- **Pertahanan dan Keamanan**

Peristiwa peledakan bom di berbagai tempat menunjukkan kelemahan pada sistem keamanan negara. Kelemahan ini muncul sebagai akibat tidak efektifnya pemerintah membangun sebuah mekanisme keamanan yang komprehensif dalam kerangka *low enforcement*.

Mekanisme dan infrastruktur yang tersedia selama ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tren global dalam sistem pertahanan serta keamanan negara. Selain itu konfigurasi politik dalam sistem politik nasional memberi kontribusi bagi penataan sistem keamanan negara akibat ketegangan

dan konflik kepentingan antara faksi-faksi politik dan pemerintahan di tingkat elit negara. Karena itu untuk memulihkan kondisi keamanan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah harus mengakhiri konflik-konflik di dalam tubuhnya sendiri sehingga dapat bekerja secara profesional sesuai minat dan bakat.

Menyikapi kondisi ini, peran kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong berlanjutnya agenda transisional dan partisipasi untuk melakukan kontrol atas penyalahgunaan wewenang dan mandat pada otoritas-otoritas yang berkuasa menjadi penting. Rakyat harus mengontrol dan menggugat para birokrat dan elit partai yang tidak mau menjalankan agenda transisi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kerja bernegara.

Perlunya pembenahan mekanisme kontrol terhadap pihak-pihak yang memiliki akses terhadap bahan peledak dan yang mampu menjalankan operasi dengan menggunakan bahan peledak tersebut. Perbaikan ini diperlukan untuk mengefektifkan keda-kerja pengontrolan terhadap peredaran bahan peledak dan alat-alat teror lainnya. Dengan mekanisme yang profesional, pemerintah diharapkan bisa serius melakukan penelusuran terhadap berbagai peristiwa lewat pencegahan dini terhadap ancaman keamanan masyarakat dan pertahanan negara, khususnya ancaman yang terjadi dari dalam negara sendiri.

Di Indonesia regulasi mengenai tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Filosofi yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa Terorisme adalah merupakan musuh umat manusia,

kejahatan terhadap peradaban, merupakan Internasional dan Transnational Organized Crimes.

Tujuan dari terbentuknya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan paradigma tritunggal yaitu melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melihat semua warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara Indonesia, termasuk fasilitas Republik Indonesia diluar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsulat. Kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tindak pidana terorisme ini juga berlaku diatas tempat yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar kedalam Undang-undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan atau oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia (*Asas Extra Teritorial/Long Arm Juridicfion*).

Sedangkan pengecualian terhadap tindak pidana terorisme adalah tindak pidana politik seperti tersebut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perbedaan Pasal 6 dan Pasal 7 adalah Pasal 6 merupakan delik materiil sehingga unsur yang harus dibuktikan

adalah akibat perbuatan berupa munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, sedangkan Pasal 7 adalah delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memperinci pengertian tindak pidana terorisme yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing bisa ditafsirkan meliputi dua macam tindak pidana bila dilihat dari akibatnya, yaitu :

- i. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Rumusan tindak pidana ini menitikberatkan pada munculnya akibat yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan cara yang digunakan

yaitu merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, dalam pasal 7 harus dibuktikan maksud untuk mencapai akibat tersebut) yang perlu diperjelas dari rumusan ini adalah apa yang dimaksud dengan suasana teror ? Kalau yang dimaksud adalah ketakutan atau korban secara massal seharusnya "suasana teror" tidak dimasukkan lagi karena bisa ditafsirkan sepihak oleh aparat keamanan.

- ii. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Rumusan ini dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan seperti ketakutan dan korban massal sehingga kedudukannya sejajar dalam struktu kalimat, dan tidak bisa disejajarkan dengan unsur "dengan cara'. Hal ini sangat berbahaya karena mengandurng ketidakjelasan tentang perbuatan kekerasan apa sebagai caranya serta apa yang dimaksud dengan obyek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional.

Dalam ketentuan pasal ini dianggap sebagai tindak pidana terorisme perbuatan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan tercantum dalam Pasal I sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain tindak pidana terorisme sebagaimana yang ditentukan diatas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga menentukan

didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai Criminal Justice Process, menurut Romli Atmasasmita bahwa *criminal justice process* dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.

Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk memproses tindak pidana terorisme, berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan lain dengan kata lain Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hukum acara pidana khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) proses penyidikan pada dasarnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dimana benar tersangka adalah pelakunya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengenai alat bukti pemeriksaan diatur dalam Pasal 27 yang meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima untuk disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- c. Data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca danJatau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. Tulisan, suara atau gambar
2. Peta" rancangan foto atau sejenisnya
3. Huruf, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Rumusan pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, perbedaannya pada anak kalimat terakhir pada Pasal 27 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme "atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya "tidak dijumpai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk keperluan penyidikan dan penuntutan penyidik dalam tindak pidana terorisme diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2).Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 diatur tentang setiap laporan intelijen dapat dipergunakan penyidik untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, dan untuk keperluan itu harus diproses melalui pemeriksaan tertutup di Pengadilan oleh Ketua./Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dan paling lama 3 (tiga) hari Pengadilan harus memberikan penetapan.

Berbeda dengan pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" dalam tindak pidana terorisme penangkapan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh) x 24 jam (pasal 28) Bahwa persidangan dalam perkara tindak pidana terorisme merupakan rangkaian proses dengan diawali pelimpahan berkas perkara dari jaksa penuntut ulnurn, pembacaan dakwaan, eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pembelaan dan diakhiri dengan putusan.

Dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 15 Tahtrn 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikenal adanya peradilan in absensia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hak tersangka dan Korban diatur dalam Bab IV dengan judul kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang terdiri dan 7 pasal, yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 42, dari 7 pasal tersebut pengaturan hak Korban dimuat dalam 6 pasal yaitu Pasal 36,38,39,40,41,42 sedangkan hak tersangka dalam memperoleh rehabilitasi diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. sedangkan dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 96.

Dalam hal setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Berbeda dengan kompensasi, bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya

adalah dalam bentuk restitusi, yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Penetapan ada kompensasi atau restitusi tersebut diberikan oleh pengadilan dan dicantumkan oleh amar putusan pengadilan yang memutus perkara tindak pidana terorisme tersebut.

1. Kompensasi.

Kuasanya dapat mengajukan permohonan kompensasi tersebut bukti pelaksanaan kepada Menteri Keuangan setelah menerima permohonan dari Korban atau kuasanya paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan memberikan kompensasi tersebut.

Pengertian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah penggantian yang bersifat materiil dan imateriil. Pelaksanaan pemberian kompensasi oleh Menteri Keuangan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut, dengan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dimaksud dan untuk Korban atau ahli warisnya mendapat salinan tanda bukti pemberian kompensasi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti dari pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut kemudian Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan dimana perkara tersebut diputuskan. Bilamana sampai batas waktu 60 hari lampau dan korban atau ahli warisnya belum menerima kompensasi maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pengadilan atas laporan korban atau ahli warisnya segera

memerintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban, demikian pula tentang perincian apakah seorang yang meninggal dunia dan orang yang cacat akan mendapat kompensasi yang sama serta adanya kerugian-kerugian materiil yang lain, misalnya rumah yang hancur, mobil atau kendaraan yang rusak diakibatkan adanya tindak terorisme. Termasuk dalam pengertian kompensasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah penggantian yang bersifat imateriil, tetapi sekali lagi dalam Undang-Undang ini tidak menentukan bentuk kerugian imateriil yang bagaimana yang akan diberikan berikut nilai nominalnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana layaknya produk undang-undang lainnya, misalnya dengan menentukan dalam salah satu pasalnya mengenai besarnya masing-masing kerugian materiil dan imateriil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan selebihnya dengan tidak mencantumkan ketentuan tersebut menjadikan ketentuan ketentuan dalam pasal pasal pemberian kompensasi tersebut menjadi tidak jelas karena pemerintah mendapat kebebasan sesuai dengan kemauan sendiri untuk menentukan kriteria dan besarnya kompensasi terhadap korban disisi lain ketidakpastian korban dan ahli warisnya dalam menerima kompensasi.

2. Restitusi

Pengajuan restitusi dilakukan oleh Korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan dan pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap pemberian restitusi juga pelaku atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaannya kepada ketua Pengadilan dengan disertai tanda bukti, dan kepada Korban atau ahli warisnya diberikan restitusi oleh pelaku.

Pengadilan setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Bila sampai dengan batas waktu 60 hari korban atau ahli warisnya belum menerima pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga, kalau ahli warisnya dapat melaporkan kepada ketua Pengadilan dan pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

3. Rehabilitasi

Berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatannya, nama baik atau hak-hak lain.

Terhadap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut kerugian dan rehabilitasi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuan Pasal 37 mengatur tentang Hak Korban untuk memperoleh rehabilitasi bila oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan tetap telah diputuskan bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum, dan rehabilitasi tersebut diberikan serta dilepas dari segala tuntutan hukum, dan rehabilitasi tersebut diberikan serta dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Seseorang yang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah kekuatan hukum tetap rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

B. Peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan hak tersangka dan terdakwa tindak pidana terorisme

Bahwa para terdakwa pada pokoknya didakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme, dan atas dakwaan tersebut para terdakwa di hukum dengan hukuman mati. Merupakan tuntutan esensial dalam penegakan hukum dalam sistem

peradilan pidana adalah mengajukan si pelanggar hukum ke pengadilan. Tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum pada tataran penyidikan adalah penyelidikan fakta dan pengumpulan bukti bahwa Tersangka adalah pelakunya, sedangkan di pengadilan menganalisa fakta sehingga diperoleh kebenaran fakta yang selanjutnya akan ditetapkan salah atau tidaknya para Tersangka/Terdakwa.

Penulis akan menguraikan tentang implementasi perlindungan²⁰ hak tersangka,terdakwa dan korban yang dilandaskan kepada studi kasus terpidana Bom Bali dengan terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim yang pada pokoknya terdakwa didakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan :Bahwa terdakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan surfsana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik.

Hak tersangka terdakwa atas pembelaan ini melihat hak untuk membela diri sendiri secara pribadi, dan atau hak untuk memiliki penasehat hukum secara bebas. Seseorang yang didakwa atas perbuatan pidana/kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat dan pengadilan berkewajiban memberikan akan hak-haknya termasuk untuk didampingi penasihat hukum jika ia mampu membayar penasehat hukum untuk membela hak-haknya tersebut jika dirinya tidak mampu maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasehat hukum dengan

²⁰ Eni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/terdakwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal. 54

Cuma-Cuma. Dalam perkara ini Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi dari tim Pembela Muslim Indonesia sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 56.

Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Pasal 28 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Putusan pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa AMROZI Bin H. NURHASYIM terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MERENCANAKAN TINDAKAN PIDANA TERORISME ". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMROZI Bin H. NURHASYIM dengan "PIDANA MATI ".

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Di dalam amar putusan pengadilan tersebut tidak dicantumkan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan undang-undang.

Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia penyelesaian perkara melalui peradilan dirasakan kurang menguntungkan bagi korban, karena tidak diberikan kewenangan yang menentukan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan

pidana sehingga banyak kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Keikutsertaan Korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai pelapor yang membantu tugas penyidik telah dimulainya proses kegiatan penyidikan dan selanjutnya ia berperan sebagai saksi. Salah satu hak Korban yang diatur dalam undang-undang tindak pidana terorisme adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya yang akan ditanggung oleh negara, serta hak restitusi yang dibebankan kepada pelaku, sedangkan hak-hak lain seperti : berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya, hak untuk menolak menjadi saksi bila hal itu membahayakan dirinya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasehat hukum, hak untuk mempergunakan upaya hukum, tidak diatur oleh pembuat undang-undang, meskipun hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang- Undang Pemberantasan Terorisme dalam Pasal 36, 38, 39, 41,42 tetapi ketentuan tersebut dalam praktek tidak pernah digunakan oleh aparat penegak hukum dan Korban sendiri karena ketentuan tersebut sebetulnya masih memerlukan penjelasan dalam bentuk peraturan pelaksanaan, misalnya dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) yang menentukan kompensasi dan atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan.

Dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Amrozi ternyata para korban tidak mengetahui mengenai haknya untuk mendapatkan atau tidak mengetahui tata cara mengajukan kompensasi maupun restitusi. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya mengenai kompensasi

dan restitusi. Menurut pendapat penulis Pasal 36 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 seharusnya diamandemen karena sulit dilaksanakan. Pasal 36 ayat (4) ini, pertama penyidik pada waktu melakukan penyidikan tidak sekaligus memperinci besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh korban atau para korban sehingga pada waktu penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum, penuntut umum disamping menuntut pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim juga menuntut ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku sehingga hakim didalam memutuskan perkara atas dasar kerugian yang telah diperinci didalam pemeriksaan ataupun di penuntut umum dapat memutuskan perkara hukuman yang dijatuhkan juga besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa atau membayar sejumlah kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa sebagai hukuman tambahan apabila terdakwa membayar ganti kerugian tersebut. Sebagai akibat perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa Amrozi disamping menderita kerugian harta benda, menderita luka badan, luka berat atau meninggal dunia atau ahli warisnya Bagaimana dalam hal ini menghitung terhadap kerugian korban yang berupa luka berat atau meninggal dunia, dimana ini perlu diperhitungkan jumlah kerugian.

Kedua Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 selama ini dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana terorisme tidak pernah dicantumkan dalam amar putusan mengenai kompensasi dan restitusi. Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) disebutkan cukup jelas, sedangkan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immaterial.

Dalam hal korban menderita kerugian materiil, bagaimana kalau pelaku atau terdakwa tidak mampu membayar ganti kerugian materiil. Menurut pendapat penulis terdakwa dikenakan hukuman subsidi dengan hukuman kurungan. Untuk akuratnya menghitung jumlah harta benda yang diderita oleh para korban memerlukan cukup waktu untuk memperinci jumlah kerugian yang dilakukan oleh ahli taksir, dalam hal ini untuk menghitung jumlah kerugian harus dilakukan dalam waktu yang cepat mengingat waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk penyidikan dan penuntutan terbatas sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bila kita cermati ketentuan Pasal 36 tersebut bahwa dalam amar putusan harus dicantumkan kompensasi yaitu kerugian materiil bila Korban dalam kasus bom Bali 1 itu terdapat 202 korban. Mampukan pengadilan menentukan jumlah kerugian material dan immateriil bagi Korban dalam waktu proses persidangan dan adakah ukuran untuk menentukan besarnya kerugian materiil dan imaterial tersebut dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) tidak pernah dapat dilaksanakan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme baik pada kasus bom Bali maupun kasus bom yang lain, misalnya bom Hotel W. Marriot maupun bom kedutaan besar Australia. Mengenai besarnya kompensasi dan restitusi ternyata kompensasi yang diberikan kepada para korban tidak seimbang dari jumlah kerugian yang diderita sedangkan restitusi yang harus diberikan oleh terdakwa kepada para korban tidak ada sama sekali.

Demikian juga ketentuan Pasal 38 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menurut penelitian penulis, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Korban atau warisnya atau kuasa hukumnya, karena hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut di atas yaitu kompensasi dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, karena ketentuan ini merupakan dasar hak untuk menuntut kepada Menteri Keuangan atas kompensasi dan hak untuk menuntut kepada pelaku tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak pernah dicantumkan dalam amar putusannya maka ketentuan tersebut menjadi mandul. Berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini diatur lain. Hal ini hubungannya dengan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa yang menyatakan apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

Dalam studi kasus hak tersangka tindak pidana terorisme atas nama Hamid Razzaq di pengadilan Negeri Makasar. Pada pokoknya terdakwa didakwa : Bahwa terdakwa telah melakukan pembantuan secara melawan hukum, menerima, menyembunyikan bahan peledak. Putusan Pengadilan Negeri terhadap terdakwa Hamid Razzaq, terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja memberikan bantuan tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang pidana terorisme". Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Atas keputusan pengadilan negeri tersebut kemudian terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Dalam putusan Pengadilan Tinggr, Pengadilan Tinggr telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa tetap dihukum selama 2 (dua) tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa merasa tidak puas dan menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah memberikan keputusan :

1. Menyatakan Terdakwa H.Hamid Razzaq, BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair dan lebihJebih subsidair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan lebih subsider dan lebih-lebih subsidair,
3. Membebaskan Terdakwa dari khaman;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Didalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut yang membebaskan Terdakwa dari dalawaan lebih subsidair dan lebih subsidair lagi dan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada negara.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus

bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah kekuatan hukum tetap. Dalam ayat 3 menyebutkan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut teori absolut setiap putusan pembebasan selalu diikuti dengan pemberian ganti kerugian, tidak dilihat apakah ada penahanan yang tidak sah yang dilakukan atau kesalahan dari pejabat atau tidak. Namun teori absolut tersebut mengalmi perkembangan ialah bahwa putusan pembebasan tersebut baru memberikan hak kepada seseorang, apabila telah dilakukan penangkapan atau yang melawan hukum atas dirinya oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 di dalam Pasal 9 menentukan sebagai berikut : setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi disebabkan oleh penangkapan/penahanan yang secara melawan hukum telah dilakukan atas dirinya ialah apabila penangkapan/penahanan itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, atau penahanan/penangkapan tersebut tetap dilakukan meskipun orang yang ditangkap/ditahan telah memberikan bahwa dia adalah bukan orang yang disangka/dituduh dan kemudian apa yang dikatakan oleh orang tersebut dikemudian hari ternyata benar. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Ketentuan secara rinci mengenai rehabilitasi tersebut, diatur pula dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan umum pada Pasal I butir 23 yaitt : Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dan kemampuan, kedudukan dan harkat, martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peralihan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kmena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menyimak bunyi pasal ini maka yang harus dipulihkan adalah : Kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Pengertian kemampuan seseorang yaitu dimana dengan kemampuannya itu seseorang dapat berbuat sesuatu, sehingga seseorang dapat menjamin kehidupan keluarganya. Apabila seseorang tersebut, misalnya ahli dakwah, ahli pidato, maka hal tersebut perlu direhabilitasi sehingga kemampuannya dapat berfungsi kembali.

Pengertian kedudukan adalah tempat seseorang di dalam suatu sistem, misalnya ia menjabat sebagai ketua partai, sebagai pegawai negeri, sebagai direktur, maka apabila ternyata ia tidak bersalah, maka kedudukannya itu harus dikembalikan kepada tempatnya semula.

Sedangkan harkat dan martabatnya adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat sehingga orang tersebut merupakan orang yang terpendang dilingkungannya. Harkat dan martabatnya berkait erat dengan nama baik seseorang,

karena dengan nama baik itu seseorang dihargai oleh masyarakat, dapat dijadikan panutan oleh masyarakat. Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara dimana hal tersebut mencerminkan nama baiknya, maka nama baik yang tercemar itu harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi adalah ketentuan pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- (1). Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Menyimak bunyi pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini hanya menyebutkan "permintaan rehabilitasi oleh tersangka", tidak menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau kelumganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka hal tersebut perlu dihubungkan dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diajukan oleh tersangka keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penahanan diberitahukan kepada pemohon. Dalam pasal 12 juga timbul keraguan tentang kata " atau kuasanya ". Apabila kata " atau kuasanya " ini sama pengertiannya dengan pihak lain atas kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?

Perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada dua hal yang diaturnya yaitu tentang ganti kerugian dan

rehabilitasi. Kalau yang dimaksud oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut bahwa "atau kuasanya" sama dengan "pihak lain atas kuasanya", maka ketentuan pasal 1 butir 10 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku baik untuk ganti kerugian maupun rehabilitasi. Akan tetapi kalau pengertian " atau kuasanya " dengan "pihak lain atas kuasanya " itu berlainan, maka b" pihak lain atas kuasanya " tidak berhak untuk mengajukan rehabilitasi. Untuk itu perlu kita lihat ketentuan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa yang berhak minta ganti kerugian dan rehabilitasi adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan Kalau dihubungkan dengan pasal-pasal lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka dapat hanya tersangka, sedangkan "pihak lain atas kuasanya " (pihak ketiga) diartikan tidak sama

dengan "atau kuasanya " dengan demikian " pihak lain atas kuasanya " diartikan sebagai pihak ketiga yang hanya berhak mengajukan permintaan ganti kerugian saja.

Di dalam Pasal 82 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menentukan bahwa hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi. Sedangkan Pasal 97 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi. Sedangkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 telah memperluas dengan perkataan keluarga atau kuasanya (pengertian kuasanya ini masih dalam lingkungan keluarga). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama-tama prioritas untuk mengajukan rehabilitasi adalah tersangka. Dalam hal ini adalah logis kalau permintaan itu diajukan secara pribadi.

Di atas telah diuraikan mengenai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menentukan jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi yaitu harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberikan kepada pemohon. Jangka waktu ini berlaku juga apabila terdakwa diputus bebas dari tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, karena putusan ini dengan sendirinya berarti juga mengandung putusan mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan, kekeliruan mengenai orang atau yang diterapkan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) juncto Pasal 95 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian bahwa yang mengajukan permintaan rehabilitasi adalah tersangka⁴ keluarganya atau kuasanya. Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi biasanya digunakan di bidang hukum perdata akan tetapi

pembentukan undang-undang mengaitkan tuntutan hak- perdata ini dengan dan dalam hal salah penerapan dari ketentuan-ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman baik kesalahan dalam penerapan hukum acara maupun dalam hukum pidana materiil. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini diajarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dengan menggabungkan tuntutan perdata dengan proses perkara pidana agar supaya tuntutan perdata tersebut dapat diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, murah dan sederhana.

Kapan saatnya mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ? untuk itu perlu diperhatikan pada tingkat mana terdakwa sedang diperiksa. Jika tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi diajukan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi itu diajukan kepada lembaga peradilan. Akan tetapi apabila perkaranya sudah pada tingkat peradilan, maka tuntutan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tuntutan rehabilitasi diajukan kepada Pengadilan Negeri apabila pengadilan memutuskan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang putusan mana telah berkekuatan tetap (*in bacht van gewijsde*). Mengenai tuntutan rehabilitasi atas dasar penangkapan dan penahanan tanpa alasan undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh lembaga peradilan. Adapun bentuk putusan ganti rugi atau rehabilitasi berupa penetapan bukan berbentuk (*vonis*).

Petikan penetapan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon, penyidik, penuntut umum instansi tempat yang bersangkutan bekerja dan RT/RW tempat yang bersangkutan bertempat tinggal (pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983) Maksud daripada penetapan tersebut harus disampaikan kepada pihak instansi dan Rukun Warga atau Rukun Tetangga dimana yang bersangkutan bertempat tinggal adalah karena yang bersangkutan telah direhabilitasi atau dipulihkan haknya dalam memutuskan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu amar putusan/penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu:

- (1)' Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi sebagai berikut
:Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat
- (2).Amar Penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut
: Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan. Untuk mendapatkan kompensasi, maka korban atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan putusan pengadilan yang di dalam amar putusan memuat tentang hak untuk mendapatkan kompensasi. Sedangkan untuk mendapatkan restitusi, maka korban atau kuasanya mengajarkan hal itu kepada "pelaku" atau pihak ketiga yang disertai putusan yang memuat tentang hak untuk mendapatkan restitusi. Bagi korban yang ingin memulihkan hak dan martabatnya maka

dapat mengajukan rehabilitasi kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Keuangan yang menerima permohonan untuk mendapatkan kompensasi dan pelaku sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi kewajibannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan permohonan kompensasi dan restitusi diterimanya. Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara" dengan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, sebagaimana dimaksud di atas disampaikan pula kepada korban atau ahli warisnya. Pengadilan Negeri yang telah menerima tanda bukti telah dilaksanakan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dipaparkan pengumuman untuk diketahui umum.

Apabila ternyata pelaksanaan pemberian kompensasi dan restribusi kepada pihak korban melampirkan batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan keterlambatan tersebut kepada pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Pengadilan yang menerima laporan tentang belum dilaksanakan isi amar putusan, segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan perintah tersebut pahnng lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung tanggal perintah tersebut diterima.

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilaksanakan secara bertahap, maka hal itu harus dilaporkan kepada pengadilan yang memutuskan perkara itu. Dalam Pasal 38 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa pengajuan

rehabilitasi dilalrukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Didalam penjelasan pasal tersebut cukup jelas. Namun demikian berapa jumlah besarnya kerugian yang diakibatkan terdakwa telah ditahan mulai dari penyidikan sampai ke tingkat kasasi dan kerugian immateril akibat harkat martabatnya, kedudukannya, belum lagi kehilangan pekerjaan yang pernah dilakukan. Apakah terdakwa yang menjadi korban harus memperinci sendiri akibat kerugian yang telah dideritanya atautkah pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4A ayat (1). Pelaksana pemberi kompensasi danlatau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau lebih ketiga laporan Ketua Pengadilan yang memutuskan perkar⁴disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pernberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi. Sesuai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan atau restitusi dimaksud ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 12 menyebutkan permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu permintaan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri seperti oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77, diajukan oleh tersangka" keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selamballambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah

putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atas pemohon diberitahukan kepada pemohon.

Dengan demikian pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bentuk-bentuk pembayaran kepada korban pada dasarnya dibagi menjadi lima jenis:

- (1). Ganti kerugian yang berkarakter perdata dan diputus dalam proses perdata.
Bentuk ganti kerugian semacam ini tidak dikaitkan dengan fakta penderitaan korban atau kerugian korban diakibatkan oleh kejahatan, karena kejahatan semata-mala dipandang sebagai serangan melawan negeri bersifat pidana dan kerugian korban dianggap urusan perdata.
- (2). Ganti kerugian berkarakter perdata dicampur dengan karakter pidana dengan putusan dalam proses pidana sehingga ganti rugi dianggap berkarakter pidana
- (3). Denda yang bersifat restitusi sebagai kewajiban keuangan bagi pembuat atas kerugian korban dalam proses pidana disamping pidana lain yang diputuskjan oleh peradilan pidana
- (4). Kompensasi atas korban kejahatan akan tetapi korban bukan sebagai pihak penuntut tetapi hanya sebagai pemohon dan jika permohonannya dikabulkan hanya merupakan bantuan negara kepada pemohon.
- (5). Kompensasi terhadap korban sebagai konsekuensi tanggungjawab terhadap warganya sehingga pembayaran wajib dari negara dalam hal terjadi kejahatan (the

Criminal Campensation Bill), atau pembayaran sebagai tanggung jawab negara karena negara gagal mencegah kejahatan (*the Criminal Injuries Campensation*)-

Disisi lain pembayaran "oleh pembuat" dapat dikategorikan menjadi lima jenis pula dalam susunan sebagai berikut :

- (1). Restitusi (restitution) yang dibayarkan oleh pembuat kepada korban yang diakibatkan kejahatan tertentu yang nyata-nyata menimbulkan kerugian.
- (2). Kompensasi (compensation) yang dibayarkan oleh negara sebagai kewajibankarena kegagalan mencegah yang nyata-nyata tidak dapat diproses melalui restitusi.
- (3). Kompensasi yang dibayarkan oleh negara sebagai akibat korban dari penyalahgunaan kekuasaan umum (*abuse af public power*) dari pemerintah, peradilan, kekuasaan umum lainnya.
- (5). Bantuan untuk korban sebagai rasa simpati negara (assistance) dalam hal mengganti penghasilan yang hilang atau bantuan lainnya.

Meringankan penderitaan korban dari akibat kriminalitas ternyata dilakukan dengan berbagai cara tergantung sudut pandang yang tumbuh perhatian terhadap korban kriminalitas. Pendirian pertama (1) berpandangan bahwa penguasa negara tidak boleh memasuki urusan konflik antara pembuat dan korban penguasa negam tidak boteh memasuki urusan konflik antara pembuat dan korban kriminalitas, karena bantuan untuk korban termasuk dalam wilayah hukum perdata. Pendirian (2) berpandangan bahwa penguasa negirra mempunyai kewajiban sendiri untuk bertanggung jawab memberikan bantuan kepada korban menurut aturan huum adminishasi negara guna mengimbangi kewajiban negan untuk menindak (prevensi)

terhadap pembuat kriminal menurut aturan hukum pidana. Dalam pandangan ini penguasa negara melalcukan kewenangan ganda yarig pada satu sisi terhadap korban berlandaskan aturan hukum administrasi negar4 dan pada satu sisi yang lain terhadap pernbuat kriminal berlandaskan aturan hukum pidana. Pendirian ketiga (3), berpandangan bahwa kepada korban harus dapat menjadi bagian dari penerapan hukum pidana yang prosesnya diatur pada kewenangan kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan untuk menetapkan perhitungan jumlah ganti rugi sudah dicantumkan dalam proses verbal dan berlanjut dalam pemeriksaan dan penetapan ganti rugi manakala sudah mempergunakan pertimbangan hukum lebih dahulu dengan eksekusi diserahkan kepada kejaksanaan. Kesamaan antara pendirian pertama kedua dan ketiga adalah sama-sama memperhatikan korban dan membantu pembayaran penderitaan korban, dengan perbedaan prosedur hukum dalarn proses bencaranya dan pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum yang mengandung aspek viktim dan viktimisasi.

Kecenderungan baru untuk mengatasi ketidakpuasan hasil pemberian bantuan kepada korban baik menurut prosedur hukum perdata maupun hukum administrasi negara serta hukum pidana, tumbuh model "perdamaian" dimana antara pembuat dan korban melalnurkan penyelesaian damai (dading) secara langsung maupun perantaraan pihak ketiga secara "mediasi"- Model perdamaian ini banyak ditemukan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas dimana pembuat menawarkan ganti rugi atau korban cukup meminta ganti rugi, dan setelah terjadi kesepakatan damai dengan ganti rugi maka perkara selesai tanpa berurusan dengan peradilan pidana

Kelemahan penyelenggara kompensasi atau ganti rugi kepada korban dalam pelaksanaannya akan mengalami prosedur birokrasi. Oleh karena itu apabila dilakukan angket para korban, diperkirakan akan memilih cara ganti rugi langsung pembuat daripada menerima dana dengan cara anonim. Paradigma yang tumbuh dari model perdamaian dan menerima langsung antara pembuat dan korban akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana yang berorientasi dengan kemajuan viktimologi.

Perubahan pandangan tentang hukum pidana yang berorientasi dengan viktimologi atau dengan ilmu-ilmu bantu lainnya, menumbuhkan pola pikir hukum baru yang tidak semata-mata bersifat "co-ersd dan represif" dan tegar diragukan efektifitasnya melainkan tumbuh bersifat "persuasif dan preventif". Di beberapa negara maju sudah dapat menerima penerapan hukum pidana yang beraspek "pardonable" dalam arti karena sifat kriminalitasnya tidak termasuk kriminal berat oleh putusan pengadilan dimaafkan atas perbuatan yang menjadi perkara pidana dan dengan sendirinya mengalami penderitaan berat atau kerugian besar.

Doktrin hukum tentang faktor pemaaf dalam putusan pengadilan bagi perbuatan kriminal tertentu itu, ada yang berpendapat dipengaruhi oleh perkembangan poenologi yang mengembangkan teori alternatif untuk tidak mengenakan sanksi pidana penjara karena dampak negatif dari prisonisasi bagi kepentingan pembuat kriminal bukan untuk kepentingan korban.

Perhatikan terhadap korban dan ganti rugi yang diakibatkan dari ulah perbuatan kriminal oleh seoftrng pembuat kriminal dapat diselenggarakan ganti rugi (restitution), tetapi jika korban diakibatkan dari ulah "stete criminality"

memungkinkan ganti rugi (compensation) sepanjang sumber dananya berasal dari negara atau pemerintah. Dengan demikian akan tumbuh pemberian ganti rugi dalam arti "compensation" pemberian dari negara atau pemerintah, dan arti pemberian dari pembuat kriminal. Sedangkan korban menerima bantuan yang bersifat lain dari dua bentuk kompensasi dan restorasi, berarti korban menerima bantuan bentuk "assistance" dalam arti penyaluran dana sosial yang diperuntukan bagi korban secara khusus. Model perhatian terhadap korban dan ganti rugi yang diakibatkan oleh pembuat kriminal dan di dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana apabila diukur dari viktimologi, belum menunjukkan dengan jelas konsep victimisasi dan aturan viktim sesuai dengan ajaran viktimologi. Pemberdayaan posisi hukum korban akibat dari kriminalitas dalam sistem peradilan pidana perlu dikembangkan pada gerakan reformasi hukum yang memperbaharui hukum pidana serta hukum acara pidana berorientasi kepada kepentingan korban. Selama ini yang menonjol pada reformasi hukum di bidang hukum pidana lebih diberdayakan peningkatan perhatian terhadap perlindungan hukum pembuat kriminal baik ditingkat tahapan sebagai tersangka terdakwa dan terpidana maupun pada tingkat tahapan sebagai narapidana.

Keseimbangan pemberdayaan posisi korban dan posisi pembuat dari kriminalitas harus dapat dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada "affenders oriented" dan "victim oriented" yang harus dianggap sama-sama sebagai pencari keadilan sederhana di muka hukum dan peradilan. Praktek hukum dan peradilan di Indonesia oleh Polisi dan Jaksa serta hakim masih dapat dianggap tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan

(knowledge, scientific). Nasib korban yang kurang perhatian demikian ini dapat disebut "terjadi viktimisasi sekunder" (secondary victimization) disamping terjadinya korban dari akibat perbuatan kriminal oleh pembuat kriminal yang disebut "terjadi viktimisasi primer" (primary victimization) serta korban dari akibat sistem peradilan oleh pengadilan yang menjadi institusi masih konvensional yang dapat disebut "terjadi korban tersier" (tertiary victimization) sebagai keterbelakangan hukum korban di Indonesia. Sebagai contoh wanita Marsinah dan wartawan Udin yang keduanya mengandung perkara misterius. Kedua kasus ini menambah jumlah korban dari kasus-kasus dimasa lalu berarti terdapat keterbelakangan dari "Victim-Oriented Legal Reform" dan dari "Victims and the Criminal Justice System". Sistem hukum dan peradilan Indonesia masih menganut cara "Negara mengambil hak korban melalui sistem peradilan pidana" yang dapat dianggap sumber ketidakadilan dari negara melalui kepanjangan tangan alat negara penegak hukum.

Walaupun ada pendapat bahwa Indonesia sudah memperhatikan korban didalam aturan Kitab undang-undang Hukum Acara pidana namun pendapat yang demikian itu tidak seluruhnya benar karena belum tampak aspek pemberdayaan posisi korban dalam lingkup hukum korban ada konteks suatu sistem tiga tahapanyaitu pra adjudikasi (*pre adjudication*), tahap adjudikasi (*adjudication*) dan tahap pasca adjudikasi (*Post adjudication*). Demikian juga masih ada tegasnya cara penyebutan istilah korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap korban. Istilah korban disebut "pelapor" (Pasal 108 Kitab undang-undang Hukum Acara pidana) yang kadangkala dilakukan oleh bukan korban tetapi pihak ketiga terhadap petugas penyidik, bisa juga disebut "pengadu" (pasal 72

Kitab undang-undang pidana) dalam delik yang pemrntutannya hanya berdasarkan pengaduan, bisa juga disebut' pihak ketiga yang berkepentingan manakala suatu pengembalian sesuatu hak yang melekat pada orang lain, bisa juga disebut pihak yang dirugikan" (pasal 98-99 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana) namun kesemua itu belum mengakses kepentingan korban untuk memperoleh keadilan hukum.

Kepentingan korban untuk memperoleh keadilan hukum sesungguhnya tidak dapat ditetapkan secara sederhana, karena tipologi keadilan itu beranek a ragam. Tipe keadilan yang sudah banyak dikenal baik yang berada di wilayah hukum maupun berada diluar wilayah hukum tetapi tidak dapat dipisahkan secara karena tipe-tipe keadilan itu merupakan pengembangan dari "keadilan sosial". Nilai rata dasar keadilan adalah martabat manusia yang harus diberikan/didistribusikan sebagai penghargaan atas makna keadilan yang demikian ini o'sering lebih menekankan pada distribusi yang adil" dibandingkan dengan prosedur dan interaksi. Oleh karena itu pengembangan keadilan sosial mgrunkan tipe-tipe keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksi.

Di bidang hukum pidana dalam perkembangannya tidaklam mungkin menghindarkan diri dari konsep keadilan sosial karena dalam filosofi masyarakat Indonesia terikat dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu diartikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Namun dmi keputusan hukum pidana terdapat pendapat bahwa keadilan hukum pidana itu dapatr dibedakan menjadi "keadilan retibutif" dan "keadilan restoratif". Maka keadilan retributif sebagai konsekuensi bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib masyarakat (*public order*) atau perbuatan melawan lembaga kolektif dari warga negara sehingga

dianggap menentang serangkaian standar institusi sosial masyarakat, dengan demikian dapat menekankan pada tanggung jawab negara yang memegang monopoli penuntutannya di pengadilan yang dilaksanakan oleh petugas peradilan yang berwenang. Sedangkan makna keadilan restoratif memandang kejahatan itu menentang standar masyarakat meskipun demikian pelanggaran itu pada dasarnya lebih banyak merupakan konflik antar individu menimbulkan kerugian kepada korban sebagai hal yang utama (*primantly an offences against the victim*), selanjutnya juga kerugian bagi masyarakat (*only secondarily an offence against the wider community or state*). Perkembangan masa depan cenderung pada keadilan restoratif. Terdapat bagan kesamaan antara keadilan diskributif dan keadilan retributif dimana ada perbedaan khusus yang memberikan keadilan lewat penuntutan dalam retribusi dilakukan oleh negara sebagai pemegang hak monopoli penyelenggaraan *public order*.

Sebaliknya keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang dianggap lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh para pihak dalam konflik. Pertumbuhan keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai yaitu :

1. Penyelesaian konflik (*conflict solution*) yang mengandung substansi pemberian ganti rugi (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*), serta
2. Rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*Qteae*) dan ketertiban (*order*). Nilai keadilan restoratif yang demikian itu sendi-sendi kesamaan dengan "hukum adat".

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1991 Nomor 1644./Pid/1988 memutuskan mengakui kekuatan hukum dari lembaga adat terhadap pelanggaran yang

dapat termasuk memberikan sanksi adat dan tidak dibenarkan Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara yang sudah diselesaikan dan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat

Dalam konsep Kitab Undang-Undang Pidana baru tahun 1987/1988 yang antara lain menyatakan dipertimbangkannya aspek korban kejahatan sebagai pedoman pemberian pidana (Pasal 48 Konsep). Hal ini penting sekali karena disamping untuk mengurangi disparitas pidana, hal ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan tiga kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana. Aspek korban juga diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pidana, yakni pencantuman pemenuhan ganti kerugian sebagai pidana tambahan (Pasal 64 ayat (4)). Demikian juga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 ayat 2 & 3) yang mengatur tindakan berupa perbaikan akibat-akibat tindak pidana bersama-sama dengan pidana.

Dalam menjawab Masalah I Implementasi Hak Tersangka dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme. Bab V Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang ini..

Mengenai hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Acara Pidana sampai dengan Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" yaitu mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi. Disamping itu hak-hak tersangka dan terdakwa yang

tersebut dalam Bab VI Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana antara lain hak mendapat pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya hak untuk diajukan kepada Penuntut Umum, dan hak untuk perkaranya segera diajukan ke pengadilan untuk diadili.

Hak-hak lain yaitu hak untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan hak tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disamping mengandung teori *Crime Control Model*, juga mengandung teori *Due Process Model*.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme disamping menggunakan hukum acara umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menggunakan hukum acara khusus yang mengandung teori *Crime Control Model* terhadap tersangka dengan pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia yaitu hal-hal yang disebutkan dalam pasal-pasal 28, Pasal 225 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) b yaitu perihal penangkapan oleh penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 36 menyebutkan masalah kompensasi,

restitusi dan rehabilitasi (Due Process Model) ada keseimbangan antara Crime Control Model dengan Due Process Model antara hak tersangka dan korban.

Fakta secara yuridis dalam amar putusan pengadilan tidak pernah disebutkan jumlah kerugian yang diderita korban mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Secara sosiologis, dari hasil penelitian terhadap korban ternyata bahwa korban tidak tahu mengenai haknya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Permasalahan I mengenai Implementasi Perlindungan Hak Tersangka dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum ada keseimbangan yang optimal antara hak tersangka dan korban yang selaras dengan filosofi pancasila.

Hukum acara pidana melakukan keseimbangan antara hak-hak Tersangka /Terdakwa dan hak-hak serta kewajiban dan aparat penegak hukumnya hal ini perlu demi kepentingan umum dimana individu sebagai anggota masyarakat tersebut. Dalam pasal 25 ayat {1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menelaah : penyidikan; penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang diperlukan dalam kasus tindak pidana terorisme adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana {Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kecuali Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengaturnya

Bila kita cermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak Tersangka Terdakwa dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya Pasal 19, yaitu hak Tersangka yang umumnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati seumur hidup, Pasal 24 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu hak Tersangka yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) untuk tidak dijatuhi pidana minimum. Khusus Pasal 20, 21, 22, Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu hak Tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 6 (enam) bulan, ketentuan ini menurut pendapat penulis tidak jelas meskipun dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dalam ketentuan ini terdiri 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk penuntutan tetapi dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyebut untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Bila kita konsisten bahwa kewenangan penyidik dan penuntutan itu berbeda dimana penyidikan adalah kepolisian dengan penyidik dimaksud sebagai serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Rehabilitasi diaan dalam Pasal k 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- 1). Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang pufusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2). Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3). Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim prapradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Dan tentang ganti kerugian diatas dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴ Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- (1). Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
- (2). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka terdakwa terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mencampurkan

mengenai rehabilitasi dan hak-hak lain termasuk pemulihan fisik" psikis serta perbaikan harta benda yang menjadi hak Terdakwa akibatnya pengaturannya memerlukan penjelasan tetapi ternyata Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memberi penjelasan kemungkinan diaturnya peraturan pelaksanaan atas hal tersebut diatas.

Pidana dalam perkembangan kedudukan korban tindak pidana didalam perkembangan sejarah hukum pidana sepenuhnya menjadi hak Korban. Akibat pelepasan dendam yang cenderung kejam dan tidak menyelesaikan masalah karena akan menimbulkan membuat semua berubah menjadi Korban berikutnya, dengandemikian hampir tidak ada bedanya kedudukan korban dan pelaku tindak pidana (kejahatan).

Perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan perfanmggungjawab dari si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan keseweaang-wenangan Korban diperlukan jalan hukurn melalui kompensasi dari sipembuat untuk Korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

Menurut Muladi²¹ perlunya perlindungan hukum atas korban dari tindak pidana adalah di\$asarkan atas argument kontrak social (*social Contract Argument*) dan Argumen Solidaritas Sosial (*social Sotidarity Argument*). Pendapat yang pertama menyatakan bahwa negara boleh dikatakan monopoli Terdakwa untuk memeriksa atau telah memeriksa keterangan saksi melawan keterangannya tidak perlu dilanggar

²¹ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center, 2002

jika pihak pembela diperbolehkan untuk menanyakan saksi, tentunya dengan beberapa prosedur pengamanan yang jelas.

Untuk itu perlu memberikan langkah-langkah tersebut harus dipertimbangkan dalam keadaan tertentu pada setiap kasus. Sidang pengadilan harus menentukan keadaan tertentu pada setiap kasus. Sidang pengadilan harus memperhatikan letak keseimbangan antara hak dari terdakwa akan persidangan yang adil dan terbuka dengan perlindungan kepada saksi. Bentuk-bentuk langkah perlindungan yang dapat diambil :

- a. Confidentiality, kerahasiaan. Dalam, sidang pengadilan menentukan bahwa perlindungan korban dan saksi adalah alasan yang dapat diterima untuk membatasi hak terdakwa dalam memperoleh pengadilan yang terbuka. Dengan demikian, para saksi dapat memberikan kesaksian dalam sidang tertutup pers dan masyarakat.
- b. Anonymity, Anonimitas. Dalam keputusan yang sama mayoritas dari sidang pengadilan memutuskan bahwa dalam keadaan khusus sidang memberikan status anonim penuh kepada saksi. Mayoritas sidang menganggap bahwa kesaksian anonim relevan dan sah, dan bahwa hak dari pengakuan bersalah terdakwa dalam sidang berada pada tingkat pra pengadilan.

Dalam Pasal 36 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme diatur hak-hak Korban atas tindak pidana terorisme, dimana Korban atau ahli warisnya mendapat kompensasi dan restitusi dari Korban atau ahli warisnya berhak mendapat kompensasi dan restitusi dari pengajuan kompensasi dilakukan oleh Korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar

putusan Pengadilan Negeri (pasal 38 ayat 1) dan untuk restitusi diajukan Korban atau ahli warisnya kepada pelaku atau pihak ketiga (Pasal 38 ayat 2) Sedangkan kontrol oleh badan peradilan atas pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi sudah dilaksanakan atau belum serta budi yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam soal pemberian kompensasi dan restitusi menurut pendapat penulis terdapat kelemahan dan penjelasan lebih lanjut, yaitu dalam ketentuan Pasal 36 ayat {4} yang ditentukan kompensasi dan restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan, bila dalam pemberian rehabilitasi praktek peradilan memberi batasan amar putusan sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 4, tetapi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak diberikan batasan rehabilitasi amar kompensasi, sehingga memberi kebebasan peluang bagi pengadilan untuk memberi dan menentukan sesuai dengan improvisasi Hakim Pengadila tetapi juga akan menimbulkan ketidakseragaman dalam pemberian kompensasi dan restitusi. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah perintah dalam amar putusan pengadilan tersebut hanya memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan atau pelaku untuk membayar kompensasi atau sekaligus pengadilan akan menentukan besar jumlah yang harus dibayarkan oleh pemerintah/Depafremin Keuangan dan atau pelaku atau pihak ketiga ketentuan ini penting agar menjamin kepastian agar Korban tidak menjadi Korban kesekian kali dari struktur tertentu {pembuat undang-undang dan badan peradilan}.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ditentukan sanksi bila pelaksantutn putusan pemberian kompensasi dan atau restitusi, sebab bukan tidak mungkin pihak pelaku atau pihak ketiga menolak perintahp utusan pengadilanuntuk memberi restitusi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pengadilan, dan dalam hal ini pihak yang berkewajiban dapat mengajukan upaya hukum. Permasalahan tersebut diatas belum dapat terjawab oleh Undang-Undang PemberantasaTindak PidanaT erorisme.

Menurut Romli Atmasasmita, proses legislasi di Indonesia memiliki standal tertentu dan terukar sebagaiu landasan berproses, yaitu : pertama, Idiologi Pancasila dan Undaag-Undang Dasar 1945. Kedua yaitu : Kebijakan politik pemerintah yang sedang dijalankan untuk memenuhi akan perkembangan dalam bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya dan bidang kehidupan beragama. Ketiga yaitu koordinasi, sinkronisasi harmonisasi hukum. Keempat yaitu uji kelayakanm elalui konsultasip rrblik ataum elalui prosess osialisasi.K elima yaitu perspektif substansmi enujuk epadai us constituendum. Diharapkan melalui kelima sub-proses legislasi tersebut dapat dipenuhi empat syarat sebagai peraturan -undangan yang baik yaitu mengandung landasan filosofis berbangsa dan bemegara Republik Indonesia, memiliki karakteristik dan kultur masyarakat yang merupakan landasan sosiologi bangsa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penerapan UU Nomor 15 tahun 2003 sangat berpotensi mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia para tersangka pelaku tindak pidana terorisme- Draft revisi UU tersebut Fun tidak menganggulagi kemungkinan terjadinya ekses-ekses yang akan dilakukanterhadap para tersangka. Wewenang yang terlalu besar terhadap penyidik tanpa disertai tanggungjawab dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan suatu terorisme baru yang dilakukan negara terhadap rakyat sipil atau state terrarism. Untuk itu, negara dapat memikirkan

kemungkinan pendekatan yang tidak legalis represif terhadap terorisme karena sebelumnya telah terbukti bahwa penetapan sanksi yang lebih berat terhadap teroris tidak mengurangi aksi mereka. Salah satunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsiliasi antara pemerintah, masyarakat dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

- 2) Terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya peagaturan aati-terorisme tidak akan memadai jika hanya dilakukan dalam satu undang-undang. Selain itu sudah sepatutnya aparat penegak hukum mengefektifkan ketenfuan hukum yang sudah ada dan terpencar dalam berbagai undang-undang, dengan cara mengintegrasikannya kedalam hukum yang komprehensif. Revisi UU Anti terorisme harus sesuai dengan kerangka hukum yang harus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan :pengawasan perbatasan (darat, laut dan udara), keamanan transportasi,. bea-cukai, keimigrasian*money loundring*, basis rekrutmen dan pelatihan { latihan-latihan militer ilegal}, keuangan, bahan -bahan kirnia dan persenjataan serta perlindungan terhadap keselarnatan masyarakat sipil. serta mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dalam merulnggulangi tindak pidana terorisme dilakukan secara non-diskriminatit menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak PidanaT erorisme sudah mengatur, hak tersangka/ terdakwa namun demikian implementasi undang-undang tersebut belum secara jelas dan lengkap

B. Saran/Rekomendasi

- 1) Agar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dijadikan landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, maka penyempurnaan baik secara substansial maupun secara operasional. Penyempurnaan dibidang substansial terhadap undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diajukan terhadap ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap tersangka/ terdakwa dan korban secara eksplisit dicantumkan dalam amar putusan hakim.
- 2) Secara operasional undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 masih perlu disosialisasikan tentang pentingnya implementasi ketentuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme dimasa yang akan datang seharusnya tetap menganut prinsip keseimbangan perlindungan hak tersangka/ terdakwa dan korban yang dilandaskan kepada filsafat Pancasila sebagai dasar negara dan perlu diatur lebih rinci dan terarah tentang prosedur pemberian kompensasi,restitusi dan rehabilitasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amiroedin Sjarief**, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 1996
- Andi Hamzah**, *Hukum Acara Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- , *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief**, *Kebijakan Legislatif : Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1994
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Masalah Kebijakan Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia; Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi XI-2005*, Maret, 2005
- , *Meneropong Kompetensi/Juridiksi Peradilan Militer di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Hukum*, Hotel Salak Bogor, 2006
- Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia**, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999*, (tanpa tahun dan penerbit)
- Darwan Prinst, SH**, *Pengadilan Militer Cetakan I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

David Austen, *Membongkar Jaringan Terorisme Internasional*, Jakarta Taramedia, Jakarta, 2002

Esmi Warassih Prof.Dr.,SH.MS, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, 2005

Erni Widayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Arah Kebijakan A

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Kansil, C.S. T Drs.,S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980

Nyoman Serikat Putra Jaya, Prof. Dr. SH.MH., *kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2005

Muladi, *“Undang-Undang Sebagai Perlindungan HAM dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan terorisme” Seminar Nasional” Hakikat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme”*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2003

-----, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

-----, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal(Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP)*, Semarang 1986

Moeljatno, Prof. SH, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002

-----, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Masruchin Ruba’I, *Materi Kuliah; Hukum Pidana I*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 1984

Majalah Advokasi, Vol.1 Maret, 2006

Muladi, *Demokratisasi, hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

R. Soegijatno Tjokronegara,SH, *Hukum Acara Tata Usaha Negara di Indonesia Cetakan II*, Sinar Grafika, Jakarta

Ronny Hanintijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, Lembaran Hukum dan Masyarakat,;Masalah-Masalah Hukum Nomor IX Tahun 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

-----, *Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Diponegoro Semarang, 2001

-----, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Penerbit Binacipta,1983
....., *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Ratna Nurul Afifah, SH, *Pra Pengadilan Dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1986

Roeslan Saleh , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1997

....., *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia, Jakarta, 1983

....., *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983

Samidjo, S.H, *Hukum Pidana; Ringkasan & Tanya Jawab*, Armico, Bandung, 1985

Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Jakarta, 2005

-----, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR RI Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

....., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru (tanpa tahun)

....., *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru

....., *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979

....., *Makalah : Teori dan Metode Dalam Sosiologi Hukum*, FH.UII, Yogyakarta, 1980

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977

Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983